



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2014

METODE BARU



UMUR PANJANG DAN
HIDUP SEHAT



PENGETAHUAN



STANDAR HIDUP
LAYAK





REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2014

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

<http://www.bps.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2014

© 2015 : Badan Pusat Statistik
Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

ISSN : 2086-2369
Nomor Publikasi : 07310.1517
Katalog BPS : 4102002
Ukuran Buku : 17,6 cm × 25 cm
Jumlah Halaman : viii + 107 halaman
Naskah : Subdirektorat Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM disajikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik secara resmi menghitung IPM dengan metode baru. Untuk menjaga kesinambungan *series* angka IPM metode baru, maka dilakukan *backcasting* IPM tahun 2010 sampai dengan 2013. Capaian pembangunan manusia pada tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan karena masih relatif tingginya disparitas pencapaian pembangunan antardaerah.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Indonesia yang berjudul "Indeks Pembangunan Manusia 2014" ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, November 2015
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB 1 Gagasan Pembangunan Manusia	7
Ide Dasar	7
Mengukur Pembangunan Manusia.....	10
Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	10
BAB 2 Inovasi dalam Pengukuran Pembangunan Manusia	15
Perubahan Metodologi IPM	15
Implementasi Metode Baru di Indonesia.....	20
BAB 3 Status Pembangunan Manusia	27
Posisi Indonesia	27
Status Pembangunan Manusia di Provinsi.....	28
Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota	30
BAB 4 Kemajuan Pembangunan Manusia	35
Tren Terbaru dalam Pembangunan Manusia: Melalui Lensa Indeks Pembangunan Manusia	35
Lompatan Status Pembangunan Manusia	37
Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik.....	40
Pendidikan Memperluas Peluang	42
Kenaikan Standar Hidup	44
BAB 5 Disparitas Pembangunan Manusia Antarwilayah	49
Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Wilayah Barat dan Timur	50
Kesenjangan Pembangunan Manusia Antarprovinsi	52
Kesenjangan Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota.....	59
Daftar Pustaka	64
Lampiran	67
Catatan Teknis	99

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Sepuluh Teratas Subyek Statistik Favorit Pengunjung Website BPS pada Bulan Agustus 2015	12
Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik	18
Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP	19
Tabel 4.1 Provinsi dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia, 2010-2014	36
Tabel 4.2 Kabupaten/Kota dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia, 2010-2014	36
Tabel 4.3 Perubahan Status Pembangunan Manusia di Provinsi, 2010-2014.....	37
Tabel 4.4 Kabupaten/Kota dengan Perubahan Status Pembangunan Manusia dari “Rendah” menjadi “Sedang”, 2010 dan 2014	38
Tabel 4.5 Kabupaten/Kota dengan Perubahan Status Pembangunan Manusia dari “Sedang” menjadi “Tinggi”, 2010 dan 2014	39
Tabel 4.6 Kabupaten/Kota dengan Perubahan Status Pembangunan Manusia dari “Tinggi” menjadi “Sangat Tinggi”, 2010 dan 2014.....	40

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Popularitas Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Dunia	11
Gambar 1.2	Popularitas Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	12
Gambar 2.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP.....	16
Gambar 3.1	Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN, 2013.....	28
Gambar 3.2	Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia, 2014	29
Gambar 3.3	Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2014.....	31
Gambar 4.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 1980-2014..	35
Gambar 4.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup Indonesia, 2010-2014.....	41
Gambar 4.3	Angka Harapan Hidup saat Lahir Menurut Provinsi, 2014.....	41
Gambar 4.4	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Indonesia, 2010-2014	42
Gambar 4.5	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi, 2014	43
Gambar 4.6	Harapan Lama Sekolah Menurut Provinsi, 2014	43
Gambar 4.7	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Indonesia, 2010-2014	44
Gambar 4.8	Pengeluaran per Kapita Indonesia Menurut Provinsi (000), 2014.....	45
Gambar 5.1	IPM Indonesia Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Barat dan Timur serta Status Pembangunan Manusia, 2014	51
Gambar 5.2	Perkembangan Selisih IPM Provinsi Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014	52
Gambar 5.3	Kesenjangan IPM antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2014	53
Gambar 5.4	Perkembangan Selisih AHH Provinsi Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014	54
Gambar 5.5	Perkembangan Selisih EYS Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014	55
Gambar 5.6	Perkembangan Selisih MYS Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014	56
Gambar 5.7	Disparitas Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi, 2014.....	57
Gambar 5.8	Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita Provinsi Tertinggi dengan Terendah (000), 2010-2014	58

Gambar 5.9	Disparitas Pengeluaran per Kapita Menurut Provinsi, 2014	58
Gambar 5.10	Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014.....	59
Gambar 5.11	IPM Indonesia Menurut Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2014	60
Gambar 5.12	IPM Indonesia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2014.....	62

<http://www.bps.go.id>

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2014	69
Lampiran 2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2014.....	70
Lampiran 3	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2010-2014..	84
Lampiran 4	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2014.....	85
Lampiran 5	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ASEAN, 1980-2013	98

<http://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Konsep ini menjadi cikal bakal munculnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990. Saat itu, IPM dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Sejak saat itu, IPM secara berkala dipublikasikan setiap tahun dalam suatu Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*).

Sejak pertama kali diperkenalkan, IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia. Berbagai negara mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas UNDP dan tidak sedikit yang mencoba mengaplikasikan penghitungan IPM di negaranya. Indonesia turut ambil bagian dalam mengaplikasikan konsep pembangunan manusia yang dinilai lebih relevan dibanding konsep pembangunan konvensional. Indonesia pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Namun, sejak 2004 IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan di Indonesia dalam menghitung IPM adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Selama hampir dua dasawarsa, IPM terus digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan pembangunan, UNDP mengembangkan gagasan baru dalam penghitungan pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, penghitungan rata-rata

indeks juga dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru tahun 2014. Sejak saat itu, Indonesia telah meninggalkan penghitungan IPM dengan metode yang lama. Indikator yang digunakan di Indonesia sama dengan UNDP, kecuali PNB per kapita. Indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita. Untuk menjaga kesinambungan penghitungan, IPM metode baru dihitung dari tahun 2010 hingga 2014 dan dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Metode baru penghitungan IPM ternyata membawa dampak yang harus dicermati agar tidak terjadi salah penafsiran. Metode ini menyebabkan level IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama. Selain itu, metode ini menyebabkan perubahan peringkat di beberapa daerah. Namun, peringkat yang dihasilkan metode baru tidak dapat dibandingkan dengan metode lama karena perbedaan secara metodologi.

Metode baru memberikan protret pembangunan manusia lebih utuh. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010-2014, IPM Indonesia telah meningkat 2,37 poin, yaitu dari 66,53 menjadi 68,90. Dalam kurun waktu itu, IPM Indonesia tumbuh 0,89 persen per tahun. Kemajuan ini masih menempatkan Indonesia pada level pembangunan manusia "sedang". Kemajuan pembangunan manusia di Indonesia didorong oleh kemajuan indikator yang membentuk IPM. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) di Indonesia tahun 2014 telah mencapai lebih dari 70 tahun, sementara secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan setara dengan kelas 2 SMP (belum tamat) dan penduduk usia 7 tahun ke atas berpeluang menempuh pendidikan hingga Diploma I (belum tamat). Ekonomi Indonesia yang semakin membaik turut mendorong pengeluaran per kapita per tahun penduduk Indonesia.

Secara umum, capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi dan kabupaten semakin membaik. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi NTT berhasil meningkatkan status pencapaian pembangunan manusia dari "rendah" menjadi "sedang". Sementara itu, Provinsi Riau telah berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari "sedang" menjadi "tinggi". Di tahun 2014, Kota Yogyakarta, Kota Jakarta Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Denpasar, Kota Kendari, Kabupaten Sleman, dan Kota Jakarta Timur telah berhasil mencapai level pembangunan manusia "sangat tinggi".

Peningkatan kapabilitas dasar manusia merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi

modal utama yang harus dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Oleh karena itu, untuk menciptakan manusia yang berkualitas dapat dimulai dengan perbaikan pada kedua aspek tersebut. Apabila hal ini dilakukan dengan komitmen yang serius, harapan agar manusia Indonesia memiliki umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan hidup layak dapat tercapai.

Hingga saat ini, tantangan pembangunan manusia di Indonesia yang masih memerlukan perhatian serius adalah kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah. Kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di dalam provinsi masih relatif tinggi, terutama kesenjangan di Provinsi Papua. Kesenjangan pembangunan manusia antara kabupaten dengan kota juga menjadi persoalan penting. Ketimpangan yang mencolok juga terjadi antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kemajuan pembangunan di wilayah otonom. Kunci kebijakan untuk meningkatkan kemajuan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah harus berprinsip pada hakikat pembangunan manusia. Untuk itu, program pembangunan daerah harus direncanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas kehidupan manusia.



BAB

1



**GAGASAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

Gagasan Pembangunan Manusia

Ide Dasar

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”. (Human Development Report 1990)

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) edisi pertama yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia – yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya.

Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Perspektif pembangunan manusia merupakan sebuah pemikiran radikal dalam konsep pembangunan. Perspektif ini menggantikan konsep pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita yang digunakan oleh perencana kebijakan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang dipandang dari sisi perdagangan, investasi, dan teknologi

Kotak 1.1 Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia.

Sumber: HDR 1990 halaman 10

merupakan hal yang esensial. Akan tetapi, hal itu hanya melihat manusia sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan, dan bukan sebagai tujuan dari pembangunan.

Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan Produk Domestik Bruto/PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah

untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi – sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Kotak 1.2 Kata Kunci Definisi Pembangunan Manusia

- Pembangunan manusia berarti perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat, serta perluasan kapabilitas untuk memenuhi aspirasi.
- Pembangunan manusia berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, serta pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan.

Mengukur Pembangunan Manusia

Dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup banyak variabel untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Namun, terlalu banyak indikator akan memberikan gambaran yang membingungkan. Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

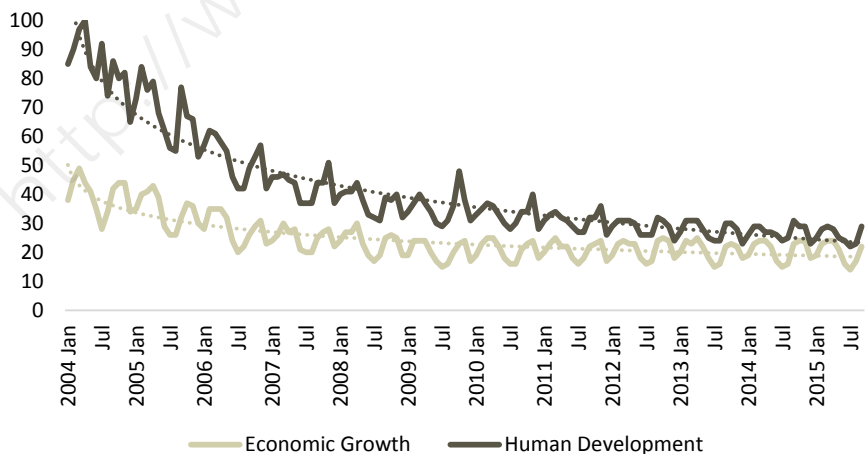
Menumbuhkan Perhatian Media

"We need a measure of the same level of vulgarity as GNP – just one number – but a measure that is not as blind to social aspects of human lives as GNP is".
(Mahbub Ulhaq)

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, berbagai kritik tentang IPM terus bermunculan. Kritikan tajam muncul terutama tentang pilihan indikator, penimbang, formula agregasi, konsep, dan lain sebagainya. Terlepas dari berbagai kritikan yang muncul, konsep pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh UNDP cukup mencuri perhatian media.

Popularitas pembangunan manusia cukup tinggi. Bahkan, popularitasnya melampaui pertumbuhan ekonomi selama 2004 hingga saat ini. Meskipun tren popularitas pembangunan manusia kian menurun, pembangunan manusia cukup dapat diterima masyarakat internasional seperti pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.1 Popularitas Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Dunia

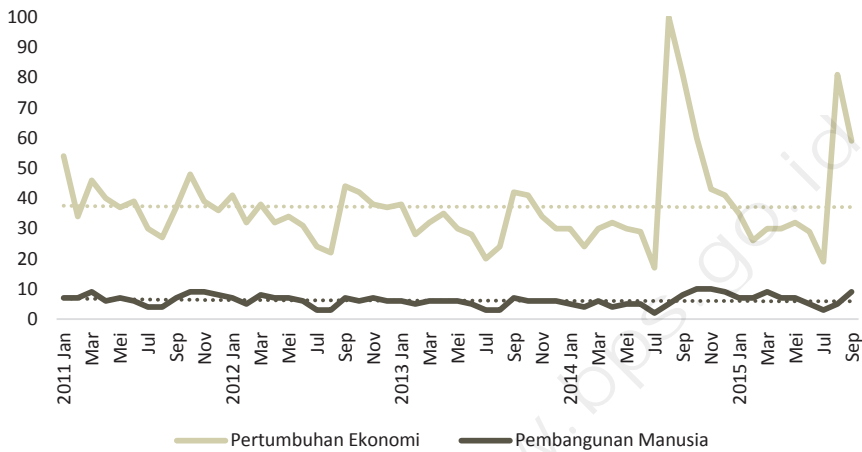


Sumber: Diolah dari Google Trends, keywords: economic growth, human development, Diakses tanggal 18 September 2015

Di Indonesia, popularitas pembangunan manusia masih kalah bersaing dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2004 hingga 2008,

popularitas pertumbuhan ekonomi jauh di atas pembangunan manusia. Kini, meski popularitas pertumbuhan ekonomi di atas pembangunan manusia, namun jaraknya tidak jauh berbeda. Pengunjung website Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan antusiasme terhadap data IPM. Meskipun masih kalah populer dengan Produk Domestik Bruto (PDB), IPM menjadi salah satu dari 10 subjek statistik favorit pengunjung *website* BPS.

Gambar 1.2 Popularitas Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia



Sumber: Diolah dari *Google Trends*, keywords: pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, Diakses tanggal 18 September 2015

Tabel 1.1 Sepuluh Teratas Subyek Statistik Favorit Pengunjung Website BPS Pada Bulan Agustus 2015

Peringkat	Subjek Statistik
1	Ekspor-Impor
2	Tenaga Kerja
3	Kependudukan
4	Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)
5	Produk Domestik Bruto (Pengeluaran)
6	Kemiskinan
7	Indeks Pembangunan Manusia
8	Konsumsi dan Pengeluaran
9	Inflasi
10	Pendidikan

Sumber: www.bps.go.id



BAB

2



**INOVASI DALAM
PENGUKURAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

Inovasi Dalam Penghitungan Pembangunan Manusia

Perubahan Metodologi IPM

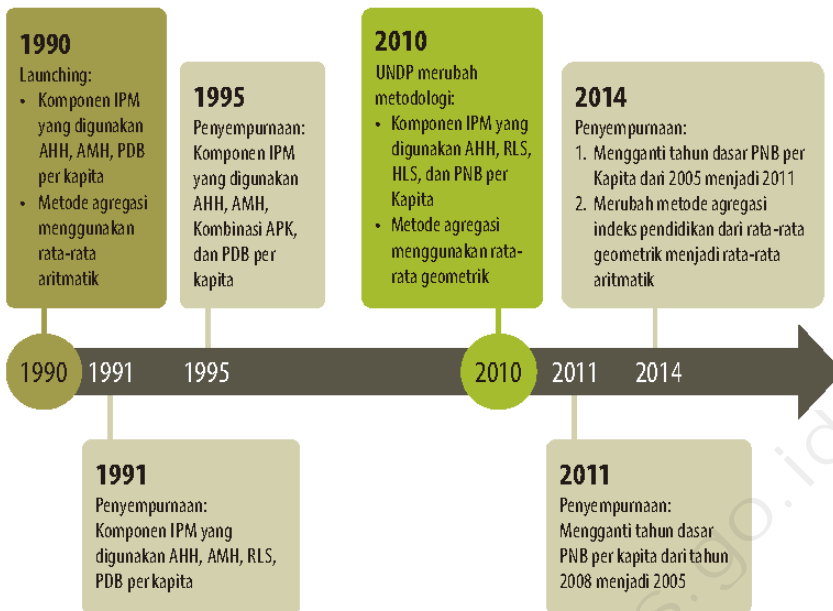
Perjalanan Penghitungan IPM

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup di dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia. Tidak hanya itu, mereka terus melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010.

Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Catatan:

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|---------------------------|
| AHH | : Angka Harapan Hidup saat Lahir | APK | : Angka Partisipasi Kasar |
| AMH | : Angka Melek Huruf | HLS | : Harapan Lama Sekolah |
| RLS | : Rata-rata Lama Sekolah | PNB | : Produk Nasional Bruto |
| PDB | : Produk Domestik Bruto | | |

terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut

berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Mengapa Metodologi Penghitungan IPM Diubah?

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Namun, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM setidaknya ada dua hal mendasar.

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi

dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3, dan 3. Dengan rata-rata aritmatik dapat diperoleh dengan mudah bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah $(3 + 3 + 3) / 3 = 3$. Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu $(2 + 3 + 4) = 3$. Secara nyata terlihat bahwa ada ketimpangan capaian antardimensi pembangunan manusia. Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di suatu wilayah. Misal, capaian ketiga dimensi secara berturut-turut menjadi 1, 3, dan 5. Dalam kondisi ketimpangan yang ekstrim ini, rata-rata pembangunan manusia tetap 3. Kondisi ini sama dengan capaian suatu wilayah pada contoh kasus pertama. Rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

Apa Saja Yang Berubah?

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang

Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Bagaimana Dampaknya?

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

Pertama, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi.

Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Beberapa negara yang telah mencoba mengaplikasi metode baru penghitungan IPM mencatat perubahan peringkat yang terjadi di tingkat regional. China misalnya, mengaplikasikan metode baru di tingkat regional mulai tahun 2013 dengan menggunakan data tahun 2011. Hasilnya cukup menggembirakan tetapi dampak yang muncul juga cukup signifikan. Tercatat beberapa provinsi mengalami perubahan drastis, antara lain Guangdong (4 menjadi 7), Hebei (10 menjadi 16), dan Henan (15 menjadi 20). Filipina juga mengalami hal serupa dimana terjadi perubahan peringkat yang tajam di tingkat regional. Misalnya, Abra (46 menjadi 51), Aklan (49 menjadi 63), Camiguin (28 menjadi 39), dan Albay (30 menjadi 43).

Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Bagaimana IPM Metode Baru di Indonesia?

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbaiki penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

PERBANDINGAN IPM METODE LAMA & METODE BARU

METODE LAMA

Angka Harapan Hidup
saat Lahir (AHH)



Angka Melek Huruf (AMH)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15+



Pengeluaran per Kapita:
27 Komoditas PPP



Rata-rata Aritmatik



Reduksi *Shortfall* (RSF)



METODE BARU

Angka Harapan Hidup
saat Lahir (AHH)

Harapan Lama Sekolah (HLS)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25+

Pengeluaran per Kapita:
96 Komoditas PPP

Rata-rata Geometrik

Pertumbuhan Aritmatik

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga diganti dengan harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcasing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

<http://www.bps.go.id>



BAB

3



**STATUS
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

<http://www.bps.go.id>

Status Pembangunan Manusia

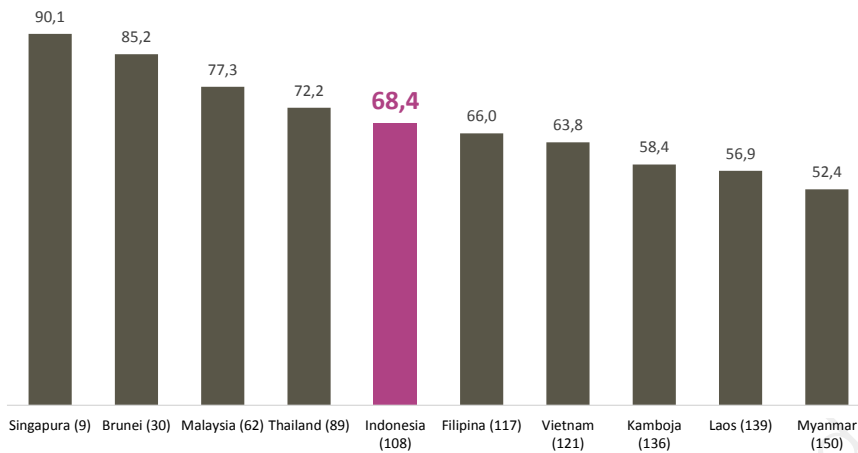
Posisi Indonesia

UNDP mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia telah mencapai 68,4 pada tahun 2013. Dengan capaian IPM itu, Indonesia berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “menengah”. Tidak hanya itu, capaian ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia pada posisi 108 dari 187 negara dalam pencapaian pembangunan manusia di dunia. Di ASEAN, posisi Indonesia berada pada pertengahan, yaitu posisi kelima. Dalam kurun waktu 1970 hingga 2010, Indonesia juga mencatat perkembangan pembangunan manusia yang menakjubkan sehingga masuk dalam *“World Top Mover in HDI Improvement”*.

Capaian IPM Indonesia pada tahun 2013 merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir menunjukkan capaian yang bagus. Saat ini, rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 70,8 tahun. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia telah menempuh pendidikan hingga 7,5 tahun atau setara dengan kelas VIII. Meski masih perlu terus ditingkatkan, harapan baru muncul. Dalam waktu bersamaan, secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,7 tahun atau setara Diploma I. Tidak kalah penting, standar hidup layak yang diukur melalui indikator PNB per kapita telah menunjukkan hal positif. Rata-rata PNB per kapita Indonesia telah mencapai 8.970 PPP \$.

Di ASEAN, Indonesia masih kalah bersaing dibanding Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Singapura telah jauh meninggalkan Indonesia yang saat ini IPM di negara yang terletak di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya ini telah mencapai 90,1 dan telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Brunei Darussalam juga telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Sementara itu, Malaysia dan Thailand telah masuk

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN, 2013



Sumber: HDR 2014

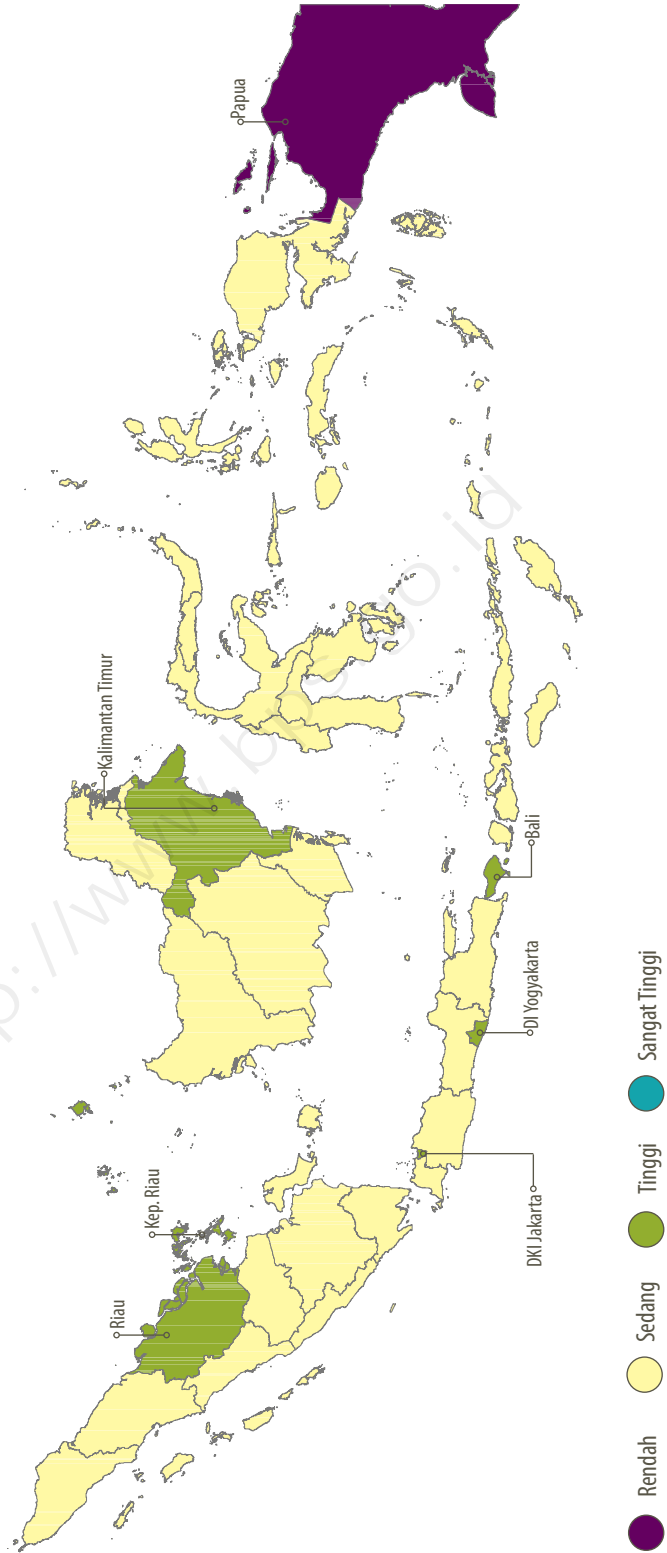
dalam kategori negara dengan pembangunan manusia “tinggi”. Indonesia bersama dengan Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Laos berada pada posisi “sedang”. Hanya Myanmar yang sampai saat ini masih berada pada kategori negara dengan pembangunan manusia “rendah”.

Level pembangunan manusia yang tinggi bukan menjadi satu-satunya indikator dalam melihat pencapaian pembangunan manusia. Perkembangan pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator penting. Indonesia dan Laos misalnya, meskipun level capaian pembangunan manusia hanya berstatus “sedang” tetapi perkembangannya sangat bagus. Keduanya tercatat sebagai negara dengan perkembangan pembangunan manusia paling cepat di dunia dan masuk sebagai “*World Top Mover in HDI Improvement*”. Selain dalam peningkatan IPM, Indonesia juga masuk sebagai negara terbaik dalam peningkatan IPM tanpa pendapatan dan peningkatan pendapatan.

Status Pembangunan Manusia di Provinsi

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2014 telah mencapai 68,90 dan telah berstatus “sedang”. Pada tingkat regional, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 78,39. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 56,75. Sebagian besar provinsi di Indonesia masih berstatus “sedang” dan sebagian kecil telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”.

Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia, 2014



Hingga saat ini, belum ada satu pun provinsi yang masuk dalam kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”. Enam provinsi telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, sebagian besar provinsi masuk pada kategori pembangunan manusia “sedang”. Dua puluh tujuh provinsi masuk pada kategori ini. Sayangnya, masih tersisa satu provinsi dalam kategori pembangunan manusia “rendah”. Satu-satunya provinsi yang masih berada pada kategori ini adalah Provinsi Papua.

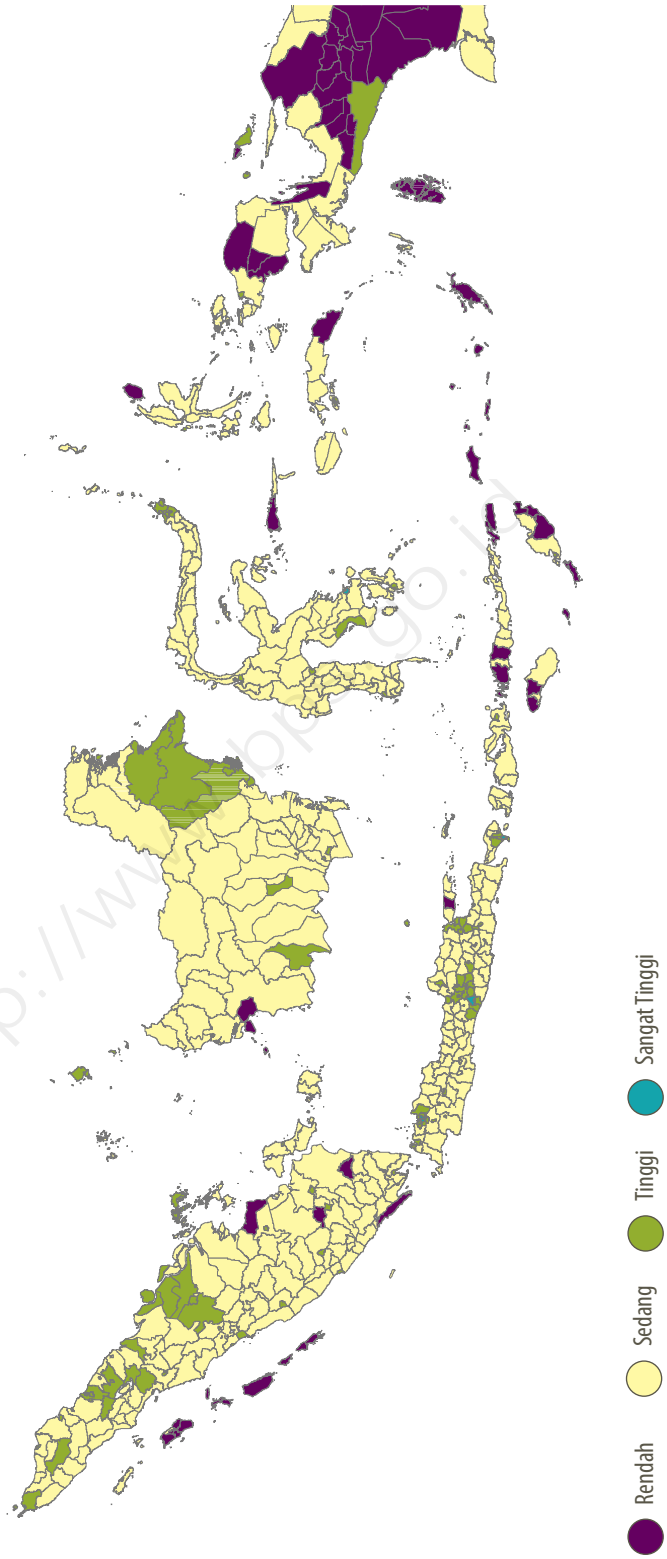
Apabila dilihat status capaian pembangunan manusia menurut pulau, terdapat variasi yang cukup menarik. Di Pulau Sumatera, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Sementara provinsi lain masih berada pada status pembangunan manusia “sedang”. Di Pulau Jawa, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi” dan provinsi lain masih berada pada status “sedang”. Di Nusa Tenggara dan Bali, hanya Bali yang telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”, sementara dua provinsi di Nusa Tenggara masih berstatus “sedang”. Di Pulau Borneo, hanya Kalimantan Timur yang telah mencapai status pembangunan manusia “tinggi” sementara provinsi lain masih berstatus “sedang”. Di Pulau Selebes, belum ada satu pun provinsi yang telah berstatus “tinggi”. Bahkan, di wilayah Maluku dan Papua masih terdapat provinsi yang berstatus “rendah”, yaitu Provinsi Papua.

Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan manusia pada tingkat provinsi menunjukkan variasi antardaerah. Pada tingkat kabupaten/kota, variasi capaian pembangunan manusia justru lebih beragam dibanding pada tingkat provinsi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Yogyakarta (Provinsi DI Yogyakarta) dengan IPM pada tahun 2014 telah mencapai 83,78. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nduga (Provinsi Papua) dengan IPM hanya sebesar 25,38. Sebagian besar kabupaten kota telah berada pada status pembangunan manusia “sedang”. Sisanya telah masuk pada kategori “tinggi” dan “rendah”. Selain itu, beberapa kabupaten/kota telah masuk pada kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”.

Berbeda dengan capaian kondisi pembangunan manusia di tingkat provinsi, beberapa kabupaten/kota menunjukkan capaian yang luar biasa. Tujuh kabupaten/kota telah berhasil masuk dalam kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”. Ketujuh kabupaten/kota itu

Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2014



adalah Kota Yogyakarta, Kota Jakarta Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Denpasar, Kota Kendari, Kab. Sleman, dan Kota Jakarta Timur. 24,1 persen kabupaten/kota atau sebanyak 124 kabupaten/kota berada pada kategori pembangunan manusia “tinggi”. Sayangnya, masih terdapat sekitar 10,1 persen kabupaten/kota atau sebanyak 52 kabupaten/kota yang berada pada kategori “rendah”. Umumnya, wilayah yang terkategori “rendah” sebagian besar berada di wilayah Papua. Sisanya berada di wilayah terluar pulau.

<http://www.bps.go.id>



BAB

4



**KEMAJUAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

Kemajuan Pembangunan Manusia

Tren Terbaru dalam Pembangunan Manusia: Melalui Lensa Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Selama hampir 35 tahun, UNDP telah mencatat perkembangan pembangunan manusia yang cukup fantastis. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kemajuan pembangunan manusia tercepat di dunia dan masuk dalam *“World Top Movers in HDI Improvement”*.

UNDP mencatat selama kurun waktu 1980 hingga 2013, IPM Indonesia tumbuh 1,37 persen per tahun. Sementara itu, selama kurun waktu 2010 hingga 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Indonesia terus tumbuh 0,89 persen per tahun.

Gambar 4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 1980-2014



Sumber: BPS dan *Human Development Report 2014*

Pola Umum

Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Seluruh provinsi menunjukkan kenaikan IPM selama periode 2010 hingga 2014. Hal serupa juga terjadi pada seluruh kabupaten/kota. Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan. Setidaknya, lima provinsi mencatat perkembangan paling cepat selama 2010 hingga 2014. Provinsi NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi menjadi provinsi dengan pembangunan manusia tercepat. Di wilayah kabupaten/kota, setidaknya sepuluh kabupaten/kota mencatat perkembangan tercepat selama 2010 hingga 2014. Kabupaten Nduga, Yalimo, Puncak Jaya, Yahukimo, Puncak, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Dogiyai, Tamberau, dan Memberamo Tengah menjadi kabupaten dengan peningkatan IPM tercepat.

Tabel 4.1 Provinsi dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia, 2010-2014

Rank	Provinsi
1	Nusa Tenggara Timur
2	Nusa Tenggara Barat
3	Sulawesi Tengah
4	Kalimantan Barat
5	Jambi

Tabel 4.2 Kabupaten/Kota dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia, 2010-2014

Rank	Kabupaten/Kota
1	Kab. Nduga
2	Kab. Yalimo
3	Kab. Puncak Jaya
4	Kab. Yahukimo
5	Kab. Puncak
6	Kab. Pegunungan Bintang
7	Kab. Intan Jaya
8	Kab. Dogiyai
9	Kab. Tamberau
10	Kab. Memberamo Tengah

Apabila ditelusuri lebih jauh, wilayah yang mencatat perkembangan tercepat sebagian besar merupakan wilayah dengan capaian IPM tidak begitu tinggi. Bahkan, beberapa wilayah merupakan daerah dengan IPM terendah. Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibanding wilayah dengan capaian yang sudah tinggi. Misalnya, wilayah-wilayah di Papua cenderung tumbuh lebih cepat dibanding wilayah-wilayah di DKI Jakarta dengan capaian IPM yang sudah cukup tinggi.

Lompatan Status Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan manusia terus meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa wilayah telah menunjukkan perkembangan yang mengembirakan seperti NTT dan NTB. Kedua provinsi ini menjadi provinsi dengan pembangunan manusia tercepat.

Selain pembangunan manusia yang terus tumbuh, perkembangan pembangunan manusia juga dilihat dari perkembangan status pembangunan manusia. Beberapa wilayah menunjukkan perkembangan yang mengagumkan selama kurun waktu 2010 hingga 2014. Sebagian berhasil meningkatkan status pembangunan manusia setingkat lebih tinggi.

Tabel 4.3 Perubahan Status Pembangunan Manusia di Provinsi, 2010 dan 2014

Provinsi	Status IPM 2010	Status IPM 2014
Riau	Sedang	Tinggi
NTT	Rendah	Sedang
Sulawesi Barat	Rendah	Sedang
Papua Barat	Rendah	Sedang

Selama empat tahun, empat provinsi berhasil meningkatkan status pembangunan manusia setingkat lebih tinggi. Provinsi Riau berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari “sedang” pada tahun 2010 menjadi “tinggi” pada tahun 2014. Sementara itu, Provinsi NTT, Sulawesi Barat, dan Papua Barat telah berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari “rendah” pada tahun 2010 menjadi “sedang” pada tahun 2014. Provinsi sisanya tidak mengalami perubahan status pembangunan manusia selama kurun waktu 2010 hingga 2014.

Pada level kabupaten/kota, 112 kabupaten/kota telah berhasil meningkatkan status pembangunan manusia menjadi tingkat lebih tinggi.

Tabel 4.4 Kabupaten/Kota dengan Perubahan Status Pembangunan Manusia dari “Rendah” Menjadi “Sedang”, 2010 dan 2014

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kota Subulussalam	33	Kab. Sintang
2	Kab. Kepulauan Meranti	34	Kab. Kapuas Hulu
3	Kab. Musi Rawas	35	Kab. Sekadau
4	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	36	Kab. Hulu Sungai Utara
5	Kab. Pesawaran	37	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
6	Kab. Bangka Selatan	38	Kab. Banggai Kepulauan
7	Kab. Lingga	39	Kab. Donggala
8	Kab. Cianjur	40	Kab. Toli-Toli
9	Kab. Pemalang	41	Kab. Parigi Moutong
10	Kab. Brebes	42	Kab. Tojo Una-Una
11	Kab. Lumajang	43	Kab. Jenepono
12	Kab. Jember	44	Kab. Bone
13	Kab. Bondowoso	45	Kab. Buton
14	Kab. Probolinggo	46	Kab. Bombana
15	Kab. Bangkalan	47	Kab. Boalemo
16	Kab. Pamekasan	48	Kab. Pokuwato
17	Kab. Sumenep	49	Kab. Gorontalo Utara
18	Kab. Pandeglang	50	Kab. Polewali Mamasa
19	Kab. Lebak	51	Kab. Seram Bagian Barat
20	Kab. Lombok Tengah	52	Kab. Buru Selatan
21	Kab. Lombok Timur	53	Kab. Halmahera Barat
22	Kab. Lombok Utara	54	Kab. Halmahera Tengah
23	Kab. Sumba Barat	55	Kab. Kepulauan Sula
24	Kab. Sumba Timur	56	Kab. Halmahera Selatan
25	Kab. Kupang	57	Kab. Kaimana
26	Kab. Timor Tengah Utara	58	Kab. Teluk Bintuni
27	Kab. Lembata	59	Kab. Sorong
28	Kab. Flores Timur	60	Kab. Raja Ampat
29	Kab. Sikka	61	Kab. Sarmi
30	Kab. Manggarai	62	Kab. Keerom
31	Kab. Sambas	63	Kab. Waropen
32	Kab. Pontianak		

Sebagian besar kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan status pembangunan manusia merupakan kabupaten dengan status “rendah”. Sementara hanya sebagian kecil yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi “sangat tinggi”. Apabila diamati, seluruh wilayah ini merupakan kabupaten dan tidak satu pun wilayah kota.

Sekitar 56,3 persen atau 63 kabupaten/kota telah berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari “rendah” menjadi “sedang”. Kabupaten/kota itu tersebar di seluruh pulau besar, mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Hampir seperlimanya berada di Pulau Jawa yang mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Jawa juga patut mendapat perhatian lebih.

Tabel 4.5 Kabupaten/Kota dengan Perubahan Status Pembangunan Manusia dari “Sedang” Menjadi “Tinggi”, 2010 dan 2014

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Aceh Tengah	24	Kab. Semarang
2	Kab. Aceh Besar	25	Kota Pekalongan
3	Kab. Bener Meriah	26	Kota Tegal
4	Kota Sabang	27	Kab. Kulon Progo
5	Kab. Tapanuli Utara	28	Kab. Mojokerto
6	Kab. Labuhan Batu	29	Kab. Magetan
7	Kab. Simalungun	30	Kab. Gresik
8	Kota Sibolga	31	Kota Probolinggo
9	Kota Tebing Tinggi	32	Kota Pasuruan
10	Kab. Siak	33	Kota Batu
11	Kab. Kampar	34	Kota Cilegon
12	Kab. Bengkalis	35	Kota Serang
13	Kota Dumai	36	Kab. Kotawaringin Barat
14	Kota Sungai Penuh	37	Kab. Kutai
15	Kota Prabumulih	38	Kab. Kutai Timur
16	Kab. Bintan	39	Kab. Berau
17	Kab. Natuna	40	Kab. Minahasa Utara
18	Kab. Bekasi	41	Kota Bitung
19	Kota Sukabumi	42	Kota Kotamobago
20	Kab. Purworejo	43	Kab. Kolaka
21	Kab. Boyolali	44	Kab. Biak Namfor
22	Kab. Sragen	45	Kab. Mimika
23	Kab. Kudus		

Sekitar 40,2 persen atau 45 kabupaten/kota telah berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari “sedang” menjadi “tinggi”. Menariknya, tidak hanya beberapa kota yang telah meningkat statusnya, tetapi juga tidak sedikit kabupaten yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi “tinggi”. Ini mengisyaratkan bahwa kabupaten juga memiliki potensi untuk berkembang seperti wilayah kota. Hal menarik lain adalah hampir separuh kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan status pembangunan manusia menjadi “tinggi” berada di Jawa.

Tabel 4.6 Kabupaten/Kota dengan Perubahan Status Pembangunan Manusia dari “Tinggi” Menjadi “Sangat Tinggi”, 2010 dan 2014

No	Kabupaten/Kota
1	Kota Jakarta Timur
2	Kab. Sleman
3	Kota Denpasar
4	Kota Kendari

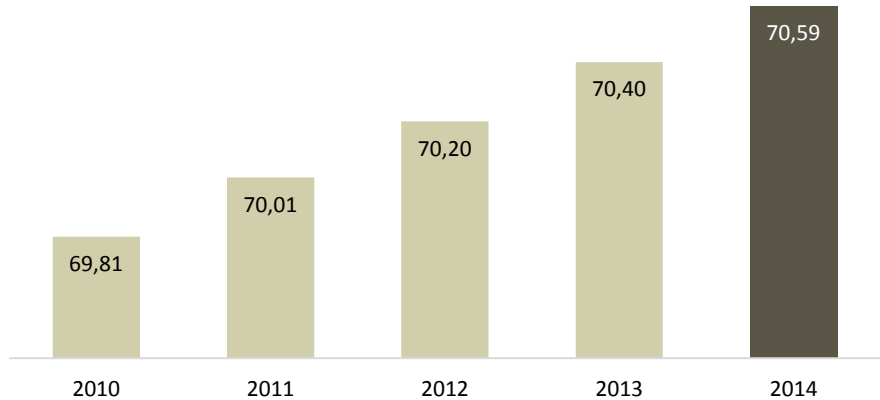
Sekitar 3,6 persen atau hanya 4 kabupaten/kota yang sukses meningkatkan status pembangunan manusia dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. Dari empat wilayah yang berhasil, tiga diantaranya merupakan kota besar di Indonesia. Sebut saja Kota Jakarta Timur, Kota Kendari, dan Kota Denpasar. Kota Jakarta Timur merupakan pusat ekonomi di DKI Jakarta, sementara Kota Kendari juga merupakan pusat ekonomi di Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan Kota Denpasar yang selain pusat kegiatan ekonomi, juga merupakan daerah tujuan wisata. Menariknya, terdapat satu-satunya kabupaten yang berhasil pada posisi ini, yaitu Kabupaten Sleman.

Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat.

Selama kurun waktu 2010 hingga 2014, angka harapan hidup Indonesia terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Saat ini, angka harapan

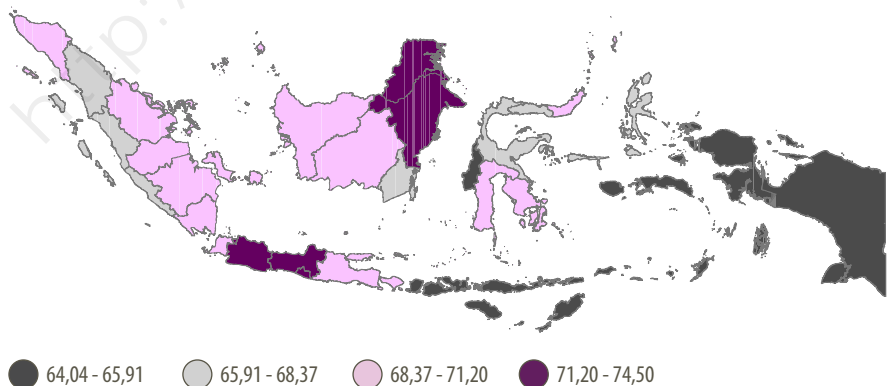
Gambar 4.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup Indonesia, 2010-2014



hidup saat lahir di Indonesia telah mencapai 70,59 tahun. Selama empat tahun, angka harapan hidup saat lahir di Indonesia tumbuh 0,28 persen per tahun.

Di tingkat provinsi, angka harapan hidup saat lahir pada tahun 2014 berkisar antara 64,04 tahun hingga 74,50 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta. Sementara angka harapan hidup terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat. Angka harapan hidup paling cepat tumbuh di Provinsi Sulawesi. Jadi, meskipun provinsi ini menjadi daerah dengan angka harapan hidup terendah, tetapi perkembangannya cukup cepat. Di sisi lain, angka harapan hidup tumbuh paling lambat di Provinsi Aceh.

Gambar 4.3 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Provinsi, 2014



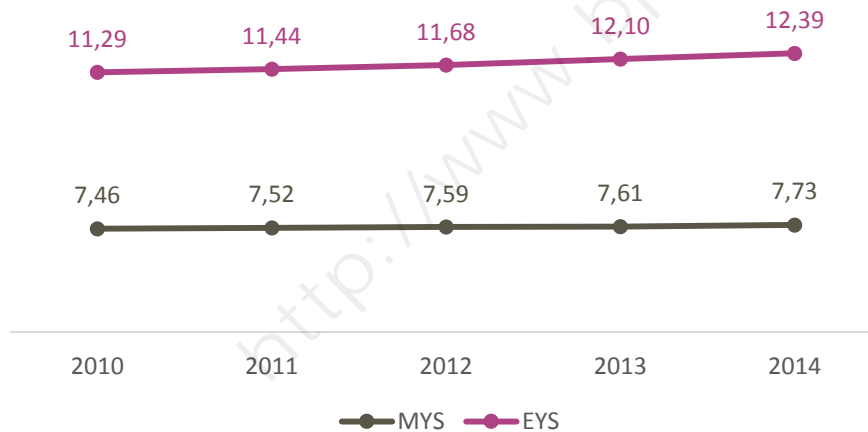
Di tingkat kabupaten/kota, angka harapan hidup pada tahun 2014 lebih bervariasi dibanding provinsi. Variasi angka harapan hidup berkisar dari 53,60 tahun hingga 77,45 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sementara angka

harapan hidup terendah berada di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Jika dilihat pertumbuhan selama empat tahun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kep. Bangka Belitung mejadi kabupaten dengan pertumbuhan tercepat. Sementara itu, Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Kotamobago di Provinsi Sulawesi Utara menjadi wilayah dengan pertumbuhan paling lambat.

Pendidikan Memperluas Peluang

Pendidikan memperluas peluang seseorang. Pendidikan meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

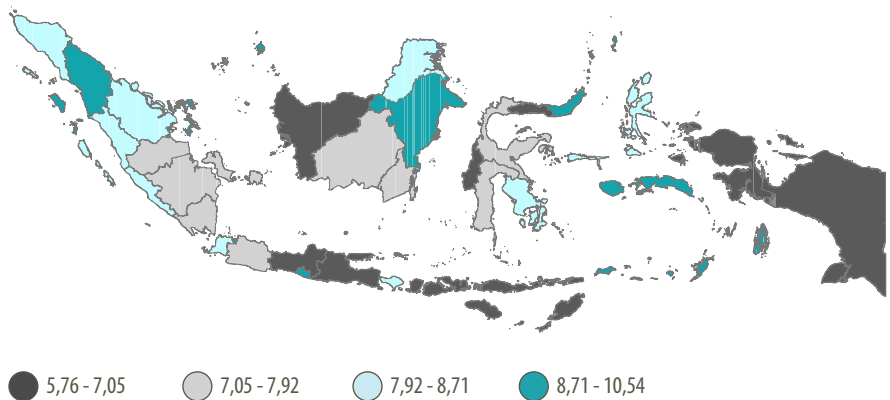
Gambar 4.4 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Indonesia, 2010-2014



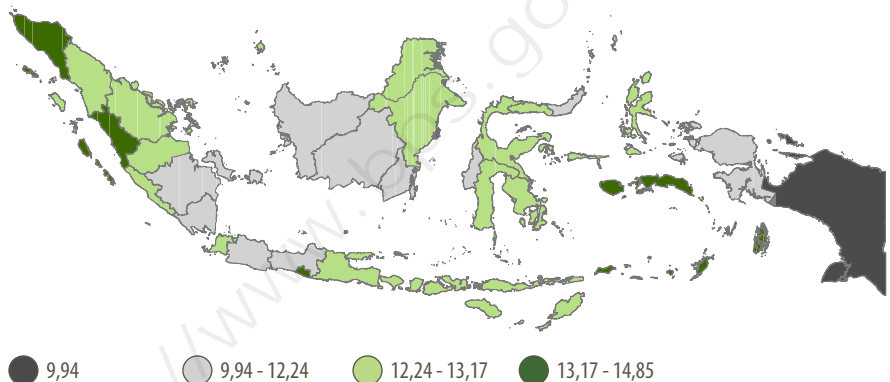
Sampai dengan tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia telah mencapai 7,73 tahun atau setara dengan kelas VII. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,39 tahun atau mencapai Diploma I. Selama empat tahun terakhir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat. Rata-rata lama sekolah tumbuh 0,92 persen per tahun, sementara harapan lama sekolah tumbuh 2,44 persen per tahun.

Di tingkat provinsi, rata-rata lama sekolah berkisar antara 5,76 tahun

Gambar 4.5 Rata-rata Lama Sekolah Indonesia Menurut Provinsi, 2014



Gambar 4.6 Harapan Lama Sekolah Indonesia Menurut Provinsi, 2014



hingga 10,54 tahun. Penduduk 25 tahun ke atas dengan rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Sementara rata-rata lama sekolah terendah berada di Provinsi Papua. Seperti halnya fenomena di tingkat nasional, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di tingkat provinsi juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah NTB tumbuh paling cepat di Indonesia selama 2010 hingga 2014. Sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan pertumbuhan paling lambat di Indonesia. Harapan lama sekolah tumbuh paling cepat di NTT selama kurun waktu 2010 hingga 2014. Dalam kurun waktu yang sama, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan pertumbuhan harapan lama sekolah paling lambat di Indonesia.

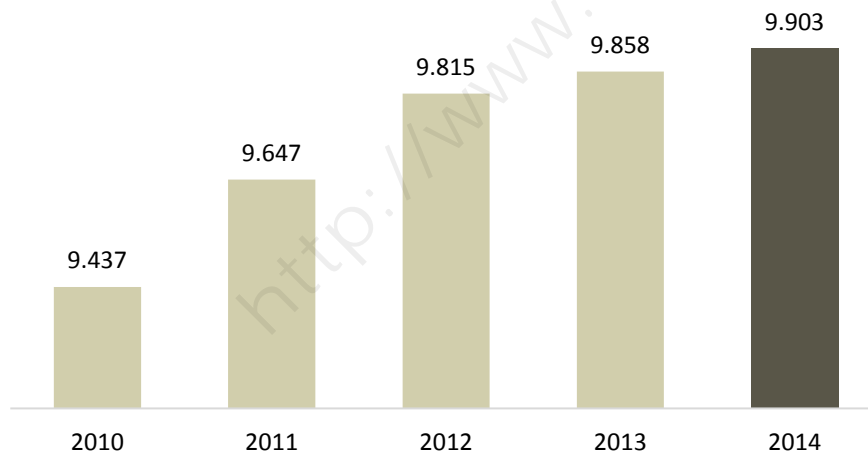
Capaian dan perkembangan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di tingkat kabupaten/kota cenderung lebih bervariasi. Rata-rata

lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2010 berkisar antara 0,63 tahun hingga 12,37 tahun. Sementara harapan lama sekolah berkisar antara 2,16 tahun hingga 16,36 tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan terendah berada di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Harapan lama sekolah tertinggi juga berada di Kota Banda Aceh dan terendah di Kabupaten Nduga. Selama kurun waktu 2010 hingga 2014, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus tumbuh. Rata-rata lama sekolah tumbuh paling cepat di Kabupaten Nduga dan paling lambat di Kota Jakarta Utara. Harapan lama sekolah juga paling cepat tumbuh di Kabupaten Nduga, sementara paling lambat di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kenaikan Standar Hidup

Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan, seperti yang telah terjadi pada era tahun 70-an. Akan tetapi uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti.

Gambar 4.7 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Indonesia, 2010-2014



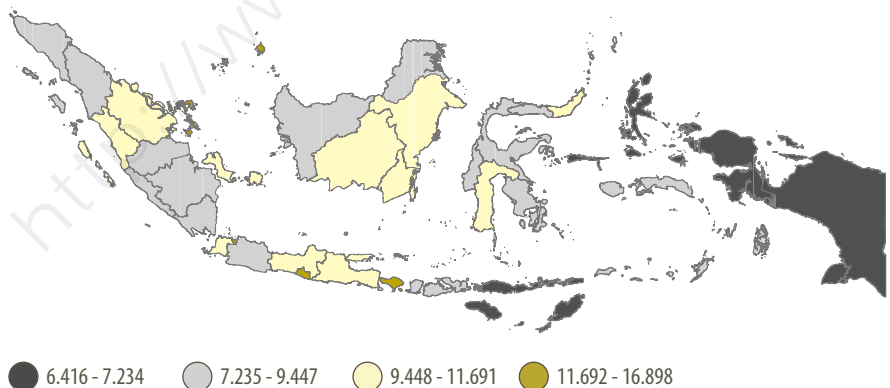
Tahun 2014, pengeluaran per kapita penduduk Indonesia telah mencapai 9,9 juta per tahun. Pengeluaran per kapita Indonesia terus meningkat selama empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,23 persen per tahun. Selama kurun waktu tersebut, perkembangan pada tahun 2012 hingga 2014 cenderung melambat dibanding perkembangan pada tahun 2010 hingga 2012. Hal ini bisa dipahami bahwa dua tahun terakhir krisis global semakin berdampak pada perekonomian di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kian melambat dan pengangguran meningkat.

Di tingkat provinsi, pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2014 berkisar antara 6,4 juta rupiah hingga 16,9 juta rupiah. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di DKI Jakarta, sementara pengeluaran per kapita terendah berada di Papua. Dalam kurun waktu empat tahun, pengeluaran per kapita di seluruh provinsi juga terus meningkat. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita tercepat di Indonesia. Sementara DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita paling lambat di Indonesia.

Di tingkat kabupaten/kota, pengeluaran per kapita pada tahun 2014 lebih bervariasi. Pengeluaran per kapita berkisar antara 3,6 juta rupiah hingga 22,2 juta rupiah. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Jakarta Selatan, sementara pengeluaran per kapita terendah berada di Kabupaten Nduga. Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita paling tinggi tumbuh di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat sementara paling lambat tumbuh di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Gambar 4.8 Pengeluaran per Kapita Indonesia Menurut Provinsi (000), 2014





BAB

5



**DISPARITAS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
ANTARWILAYAH**

Disparitas Pembangunan Manusia Antarwilayah

Kesenjangan pencapaian pembangunan antardaerah bukan merupakan masalah baru bagi Indonesia. Kompleksitas berbagai faktor seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, dan ketidakmerataan sumber daya alam merupakan hal yang masih menjadi kendala dalam menuju konvergensi pembangunan. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan masih menjadi agenda pokok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat yang secara langsung juga mempengaruhi kualitas manusianya. Oleh sebab itu, perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang selanjutnya digunakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Perbandingan pencapaian pembangunan manusia antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sangat menarik untuk dibahas, mengingat kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di KBI yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali mencapai 80 persen dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ketimpangan tersebut pastinya tidak terlepas dari faktor kualitas sumber daya manusianya.

Kesenjangan antarwilayah juga menarik jika membandingkan pembangunan manusia antara kabupaten dengan kota. Hal ini didasari alasan masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal (RPJMN, 2014-2019).

Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kawasan Barat dan Timur

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau (Badan Pusat Statistik, 2014) yang menyebar di lima pulau besar yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. Dengan luasnya cakupan Kepulauan Nusantara, maka pengelompokan area pembangunan perlu dilakukan untuk memudahkan dalam evaluasi dan penggalian potensi di masing-masing wilayah.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan pembangunan:

- (1) Kawasan Barat Indonesia, terdiri dari Jawa, Sumatra, dan Bali.
- (2) Kawasan Timur Indonesia, terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

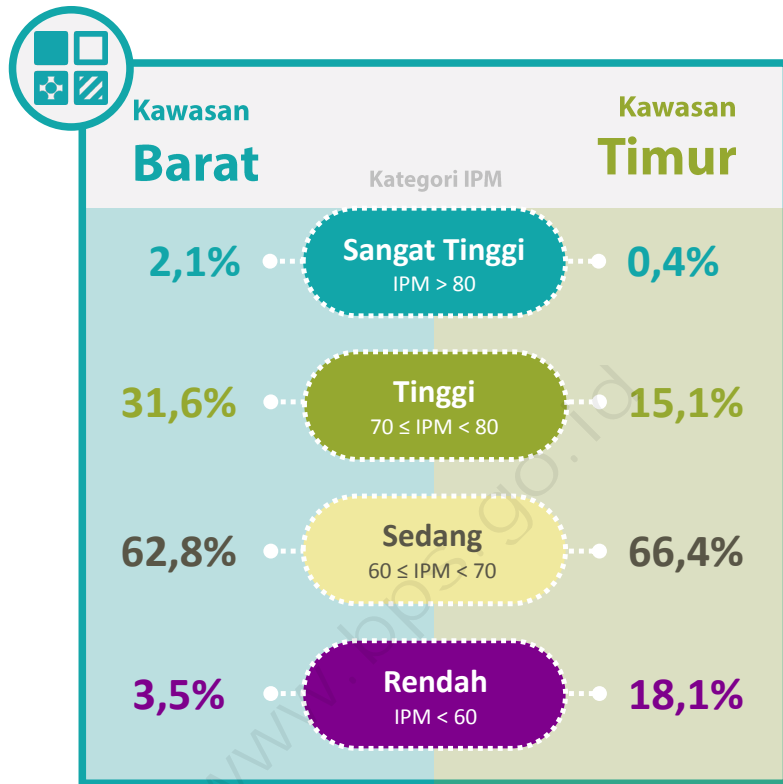
Berkaitan dengan pembangunan manusia, kesenjangan pembangunan manusia juga terjadi antara kawasan barat dan kawasan timur. Secara umum pembangunan manusia di kawasan barat memang lebih maju dibanding kawasan timur.

Capaian pembangunan manusia di kawasan barat lebih maju dibandingkan dengan capaian di kawasan timur. Di tahun 2014, sebanyak 2,1 persen kabupaten/kota di kawasan barat telah berada pada status pembangunan manusia "sangat tinggi". Sementara di kawasan timur hanya 0,4 persen kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai status pembangunan manusia "sangat tinggi".

Tahun 2014, IPM kabupaten/kota tertinggi di kawasan barat telah mencapai 83,78 dan IPM terendah hanya 56,73. Sementara di kawasan timur, IPM kabupaten/kota tertinggi hanya 81,30 dan IPM terendah mencapai 25,38. Perbedaan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia di kawasan timur lebih tinggi dibandingkan kawasan barat.

Disparitas yang cukup tinggi ini tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah hal yang perlu dilakukan sebagai titik awal menuju Indonesia yang lebih merata karena upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat.

Gambar 5.1 IPM Indonesia Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Barat dan Timur serta Status Pembangunan Manusia, 2014



Persoalan pembangunan manusia yang masih rendah dijumpai di kedua kawasan. Di kawasan barat, masih tersisa sekitar 3,5 persen kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “rendah”. Sementara di kawasan timur masih menyisakan pekerjaan rumah cukup berat. Sekitar 18,1 persen atau hampir seperlima wilayah kabupaten/kota masih berada pada status pembangunan manusia yang “rendah”.

Selama tahun 2010 hingga 2014, terjadi kemajuan pembangunan manusia di kawasan barat dan timur. Meski dari sisi capaian kawasan barat lebih unggul, penurunan kesenjangan pembangunan manusia di kawasan ini cenderung lebih lambat. Kesenjangan IPM tertinggi dan terendah di kawasan barat hanya sedikit berkurang dari 28,23 di tahun 2010 menjadi 27,05 pada tahun 2014. Sebaliknya, penurunan kesenjangan pembangunan manusia di kawasan timur cenderung lebih cepat. Pada tahun 2010, perbedaan capaian IPM tertinggi dan terendah di kawasan timur mencapai 58,51. Tahun 2014, perbedaan tersebut berkurang menjadi 55,92.

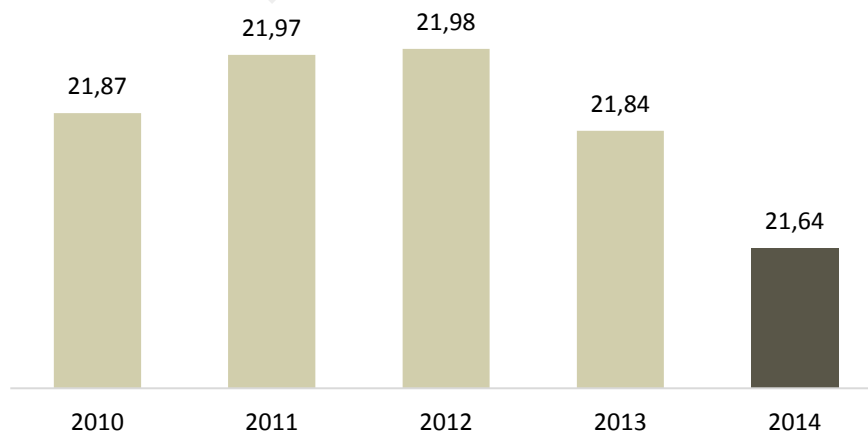
Dimensi pembangunan manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak juga mengalami perkembangan baik di kawasan barat maupun kawasan timur. Diantara ketiga dimensi, kesenjangan pendidikan tercatat semakin lebar dari tahun ke tahun, terutama pada indikator rata-rata lama sekolah, baik di kawasan barat maupun kawasan timur. Sementara dimensi yang lain relatif bervariasi antara kawasan barat dan kawasan timur.

Upaya pemerataan pencapaian pembangunan antar kawasan sebetulnya sudah diupayakan pemerintah dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tujuannya adalah mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku; dan memperkuat kemampuan SDM untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi (Kemenko Bidang Perekonomian, 2011). Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Kesenjangan Pembangunan Manusia Antar Provinsi

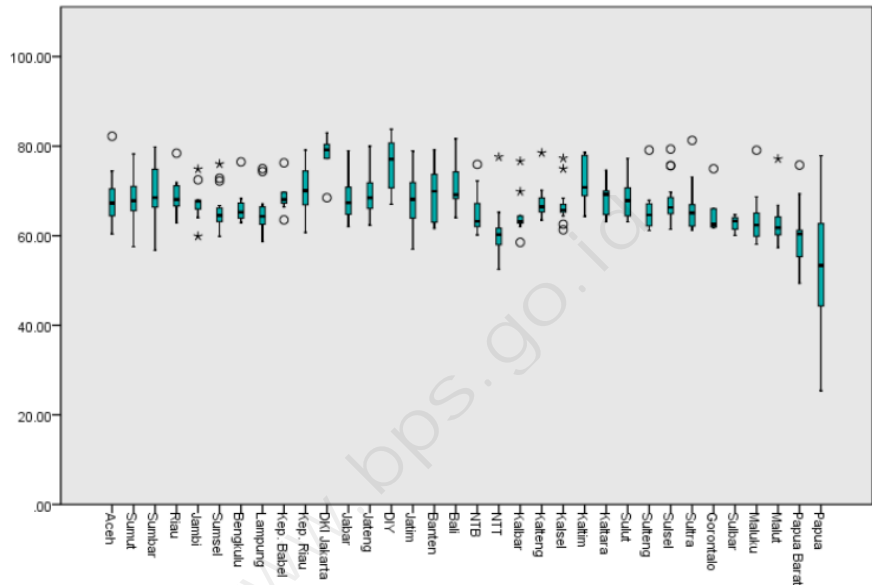
Selama kurun waktu lima tahun, kesenjangan pembangunan manusia di tingkat provinsi masih cukup tinggi dan cenderung stagnan. Selama lima tahun, kesenjangan antara IPM provinsi tertinggi dan terendah selisihnya hanya berada pada angka 21, dengan kisaran antara 21,64 hingga 21,98. Kesenjangan di tingkat provinsi selama lima tahun terakhir terjadi antara Provinsi DKI Jakarta (tertinggi) dengan Provinsi Papua (terendah).

Gambar 5.2 Perkembangan Selisih IPM Provinsi Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014



Pembangunan Papua perlu mendapat sentuhan khusus, dengan memperhatikan aspek, mulai dari faktor budaya, demografi hingga aspek spasialnya. Selain pencapaian IPM yang rendah, kesenjangan IPM kabupaten/kota di Papua pun cukup tinggi seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 5.3 Kesenjangan IPM antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2014



Kesenjangan pembangunan manusia di Papua terjadi akibat perbedaan signifikan antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga. Tercatat bahwa kesenjangan IPM antara kedua kabupaten/kota tersebut mencapai 52,48. Tingginya kesenjangan IPM antara kabupaten/kota di Provinsi Papua mengakibatkan IPM Papua menjadi rendah. Namun, meskipun kesenjangan IPM di Papua tergolong tinggi, perkembangan selama lima tahun menunjukkan hasil yang baik. Rentang IPM cenderung menyempit.

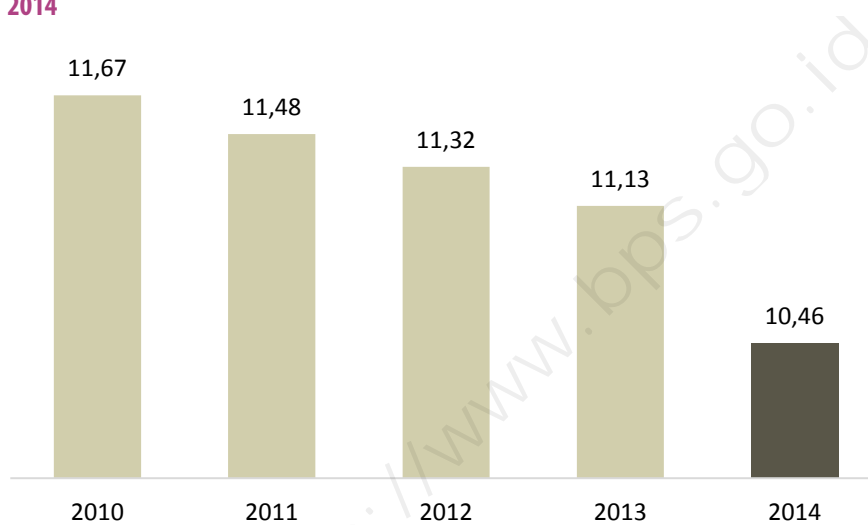
Kondisi sebaliknya justru terjadi di Sulawesi Barat. Meskipun, kesenjangan IPM kabupaten/kota di Sulawesi Barat terbilang kecil, tren dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan. Bagi sebuah paradoks, peningkatan yang signifikan di suatu wilayah, akan memperbesar jurang perbedaan jika tidak diimbangi oleh pembangunan wilayah lainnya.

Kesenjangan Kesehatan

Seiring dengan kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin membaik, kesenjangan kesehatan antarprovinsi pun semakin mengecil. Hal ini dapat dilihat dari jarak antara AHH tertinggi dengan AHH terendah.

Tahun 2014 kesenjangan AHH antarprovinsi sebesar 10,46, tergolong masih tinggi namun menurun. Dalam hal ini, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan. Tentunya, harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar kesenjangan juga semakin mengecil.

Gambar 5.4 Perkembangan Selisih AHH Provinsi Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014



Apabila ditelusuri lebih mendalam, Provinsi DI Yogyakarta merupakan daerah dengan pemerataan kesehatan paling baik. Artinya, kesenjangan AHH di wilayah ini paling kecil. Di Yogyakarta, perbedaan AHH antarkabupaten/kota tidak begitu mencolok. Misalnya, pada tahun 2014, Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah di Yogyakarta dengan AHH tertinggi yang mencapai 74,90 tahun. Sementara Kabupaten Bantul merupakan wilayah dengan AHH terendah yang hanya mencapai 73,24 tahun. Jika dikalkulasi, perbedaan AHH antara kedua wilayah hanya 1,66 tahun.

Hal berbeda justru terjadi di Provinsi Papua. Provinsi yang terletak di timur Indonesia merupakan wilayah dengan pemerataan kesehatan paling buruk. Kesenjangan AHH di Papua sangat besar. Tercatat pada tahun 2014, kesenjangan AHH antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Nduga mencapai 18,27 tahun. AHH di Kabupaten Mimika telah mencapai 71,87

tahun, sementara AHH di Kabupaten Nduga hanya sebesar 53,60 tahun. Meski kesenjangan ini cukup besar, perkembangan selama empat tahun telah menunjukkan perbaikan, rentang AHH di Papua kian lama kian menurun, yaitu dari 19,09 pada tahun 2010 menjadi 18,27 pada tahun 2014. Oleh karena itu, pemerataan sarana dan akses kesehatan harus digalakkan agar kesenjangan semakin kecil.

Kesenjangan Pendidikan

Seiring dengan perbaikan kualitas kesehatan, dalam kurun waktu 2010-2014, pendidikan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik. Harapan lama sekolah penduduk 7 tahun semakin meningkat. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 5.5 Perkembangan Selisih EYS Provinsi Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014

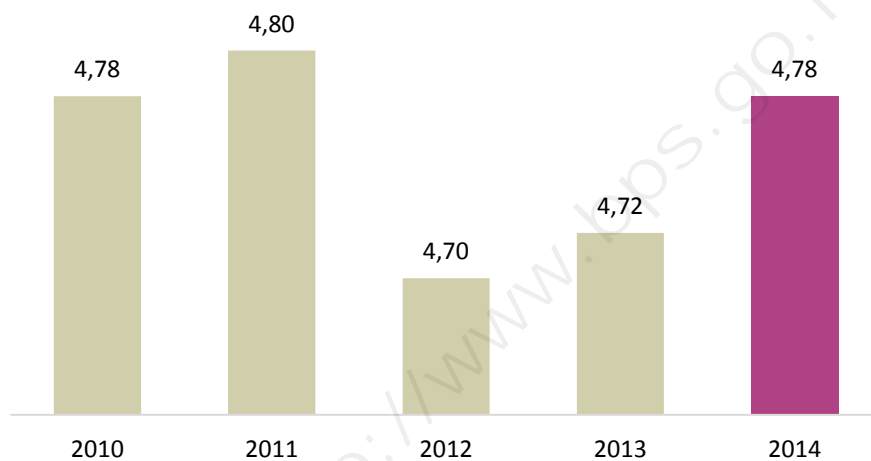


Kesenjangan capaian pembangunan pendidikan yang ditunjukkan dengan rentang angka harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di provinsi semakin membaik. Selisihnya kian mengecil sejak 2010 hingga 2014, yang berarti bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sekolah makin merata di seluruh Indonesia.

Kesenjangan angka harapan lama sekolah di tingkat provinsi terjadi akibat perbedaan capaian antara Provinsi DI Yogyakarta dengan Provinsi Papua. Pada tahun 2014, rata-rata penduduk usia 7 di Yogyakarta dapat berpotensi menempuh pendidikan selama 14,85 tahun. Di tahun yang sama, penduduk usia 7 tahun di Papua hanya berpotensi menempuh pendidikan selama 9,94 tahun.

Apabila ditelusuri lebih jauh, kondisi kesenjangan capaian harapan lama sekolah di setiap provinsi relatif bervariasi. Tahun 2014, kesenjangan paling kecil terjadi di DKI Jakarta. Perbedaan capaian harapan lama sekolah antara Kota Jakarta Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Seribu hanya 1,2 tahun. Di tahun yang sama, kesenjangan paling parah terjadi di Provinsi Papua. Kesenjangan di Papua terjadi akibat perbedaan capaian yang sangat signifikan antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga. Selisih capaian harapan lama sekolah antara kedua wilayah mencapai 11,90 tahun. Penduduk usia 7 tahun di Kota Jayapura yang akan bersekolah memiliki potensi bersekolah selama 14,06 tahun. Sebaliknya, penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Nduga hanya memiliki potensi untuk bersekolah selama 2,16 tahun.

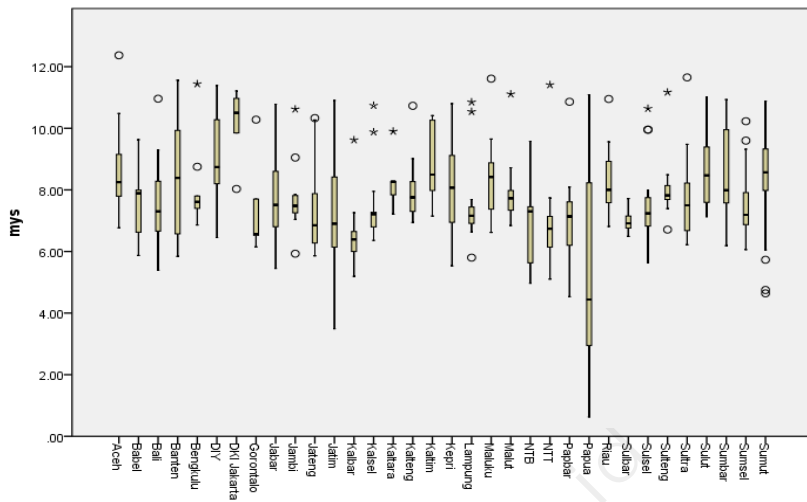
Gambar 5.6 Perkembangan Selisih MYS Provinsi Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014



Pola berbeda justru terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah. Selama hampir setengah dasawarsa, kesenjangan yang terjadi antara provinsi dengan capaian rata-rata lama sekolah tertinggi dengan terendah cenderung stagnan. Artinya, perubahan pendidikan di provinsi terendah kurang menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Kesenjangan rata-rata lama sekolah di provinsi terjadi akibat perbedaan capaian antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Papua. Perbedaan antara kedua provinsi relatif stagnan selama empat tahun terakhir. Tercatat bahwa pada tahun 2014 kesenjangan antara kedua provinsi mencapai 4,78 tahun. Di tahun tersebut, rata-rata penduduk DKI Jakarta yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,54 tahun. Sementara penduduk usia 25 tahun ke atas di Papua hanya menempuh pendidikan selama 5,76 tahun.

Gambar 5.7 Disparitas Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi, 2014



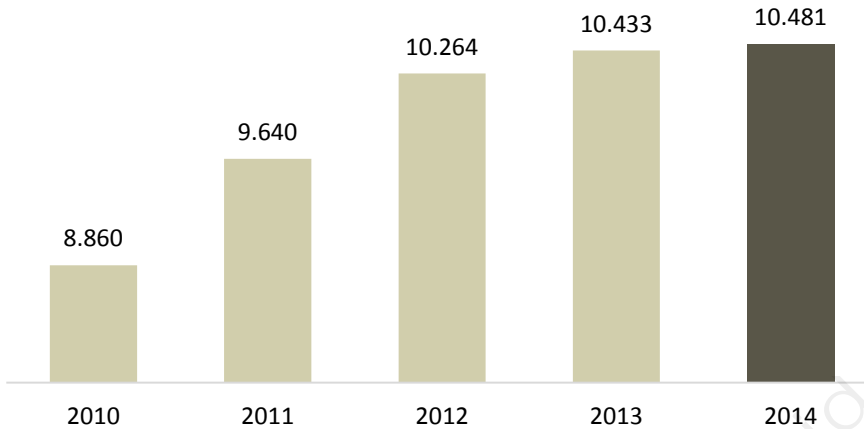
Secara umum, kondisi kesenjangan rata-rata lama sekolah di setiap provinsi juga cukup bervariasi. Meski capaian rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta merupakan yang tertinggi, namun kesenjangan rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta tidak begitu bagus. Tercatat bahwa Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan kesenjangan paling rendah di Indonesia. Kesenjangan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat hanya 1,23 tahun. Berbeda dengan Provinsi Papua, daerah ini mengalami kesenjangan capaian rata-rata lama sekolah cukup lebar. Tercatat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Jayapura telah mencapai 11,09 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Nduga secara rata-rata hanya menempuh pendidikan 0,63 tahun.

Kesenjangan Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita. Selama kurun waktu 2010 hingga 2014, pengeluaran per kapita nasional terus meningkat. Namun, hal itu masih menyisakan persoalan kesenjangan antarwilayah.

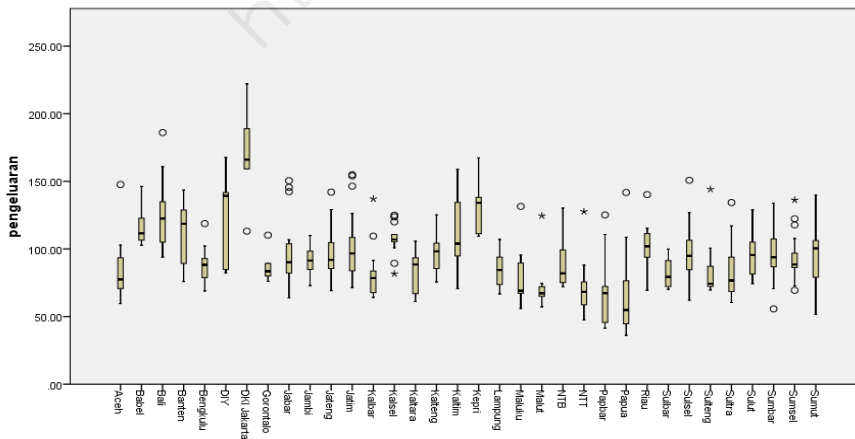
Kesenjangan pengeluaran per kapita antarprovinsi cenderung semakin meningkat selama empat tahun terakhir. Tahun 2010, kesenjangan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Papua hanya 8,8 juta rupiah. Tahun 2014, kesenjangan pengeluaran per kapita antara kedua provinsi kian melebar menjadi 10,5 juta rupiah. Hal ini berarti bahwa pembangunan bidang ekonomi di Papua masih kalah cepat dibanding dengan Jakarta sehingga kesenjangan kian melebar.

Gambar 5.8 Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita Provinsi Tertinggi dengan Terendah (000), 2010-2014



Meski DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan pengeluaran per kapita paling tinggi di tahun 2014, persoalan kesenjangan pengeluaran juga tidak dapat dihindarkan. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kesenjangan pengeluaran per kapita paling tinggi. Hal ini terjadi akibat kesenjangan antara Kota Jakarta Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pada tahun 2014, tercatat bahwa pengeluaran per kapita di Kota Jakarta Selatan mencapai 22,2 juta rupiah per tahun. Sementara itu, pengeluaran per kapita di Kabupaten Kepulauan Seribu hanya 11,3 juta rupiah per tahun. Artinya, kesenjangan pengeluaran per kapita antara Kota Jakarta Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 10,9 juta rupiah.

Gambar 5.9 Disparitas Pengeluaran per Kapita Menurut Provinsi, 2014



Lain halnya dengan kesenjangan pengeluaran per kapita yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan ini merupakan daerah dengan kesenjangan pengeluaran per kapita paling rendah. Tercatat bahwa kesenjangan pengeluaran per kapita terjadi antara Kabupaten Mamuju Utara dengan Kabupaten Mamasa. Kesenjangan pengeluaran per kapita antara kedua kabupaten hanya 2,97 juta rupiah.

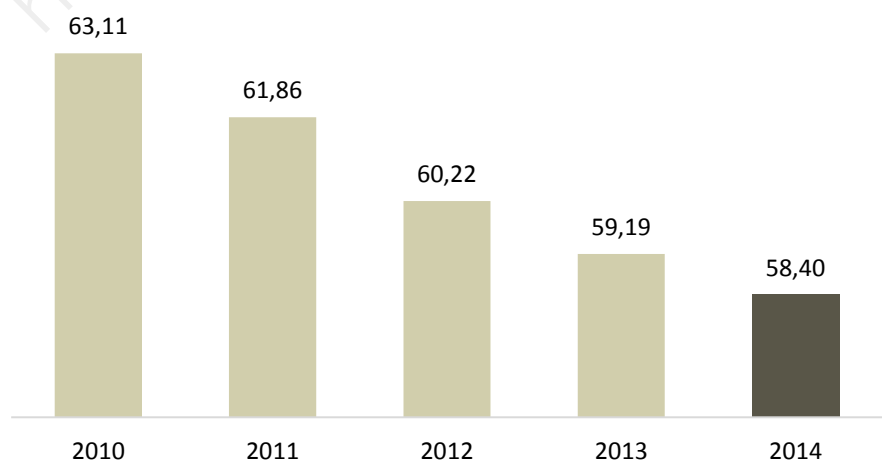
Kesenjangan Pembangunan Manusia Kabupaten Kota

Di tingkat kabupaten/kota, fenomena kesenjangan pembangunan manusia juga terjadi. Kesenjangan terjadi akibat perbedaan yang cukup mencolok antara Kota Yogyakarta (DI Yogyakarta) dengan Kabupaten Nduga (Papua). Bila dibandingkan dengan kesenjangan antarprovinsi, kesenjangan di tingkat kabupaten/kota justru lebih besar. Misalnya, di tahun 2010 kesenjangan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Nduga hampir tiga kali lipat dibanding kesenjangan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Papua.

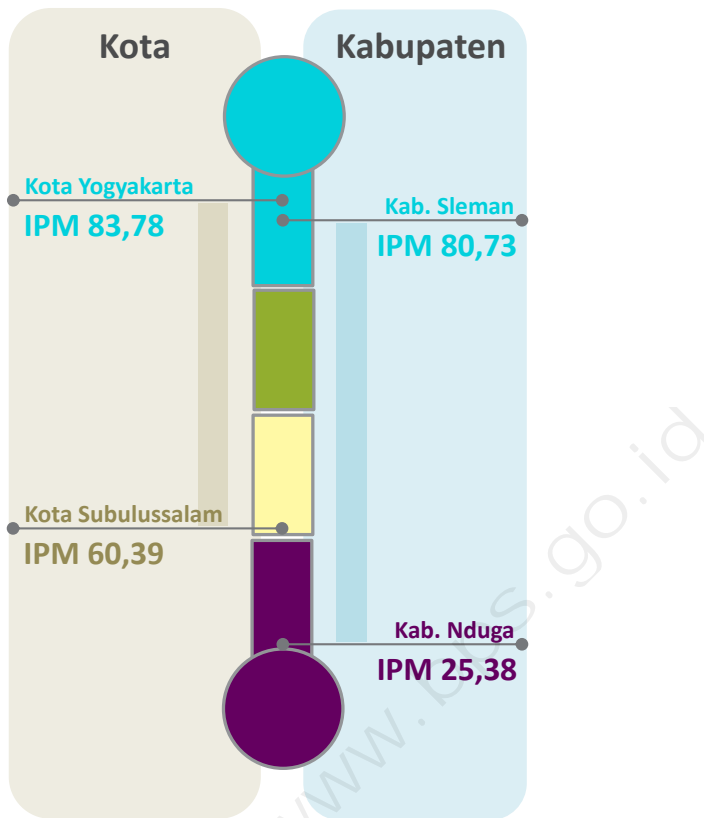
Tidak seperti fenomena kesenjangan di tingkat provinsi yang cenderung stagnan, kesenjangan di tingkat kabupaten/kota justru semakin menyempit selama kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2010, kesenjangan di tingkat kabupaten/kota mencapai 63,11. Kini, kesenjangan yang terjadi telah berkurang menjadi hanya 58,40.

Hal yang lebih menarik jika membandingkan pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten dan kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa kota

Gambar 5.10 Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah, 2010-2014



Gambar 5.11 IPM Indonesia Menurut Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2014



memiliki daya tarik tersendiri dibanding kabupaten. Kota menyediakan berbagai macam fasilitas yang memadai sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan mudah. Kemudahan akses yang tersedia di kota cukup banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara fisik umumnya kota jauh lebih maju dibanding kabupaten.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang masing-masing terdiri dari kabupaten/kota pada tingkat wilayah yang lebih kecil. Terdapat 98 wilayah kota dan 416 wilayah kabupaten di Indonesia pada tahun 2014. Secara geografis, kabupaten/kota paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Diantara seluruh provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur tercatat memiliki jumlah kabupaten/kota paling banyak.

Capaian pembangunan manusia di kota memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten. Tahun 2014 saja misalnya, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kota adalah Kota

Yogyakarta yang berada di Provinsi DI Yogyakarta. IPM Kota Yogyakarta pada tahun itu telah mencapai 83,78. Sementara itu, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kabupaten adalah Kabupaten Sleman yang juga berada di Provinsi DI Yogyakarta. IPM di Kabupaten Sleman cukup tinggi yaitu 80,73 tetapi masih di bawah Kota Yogyakarta.

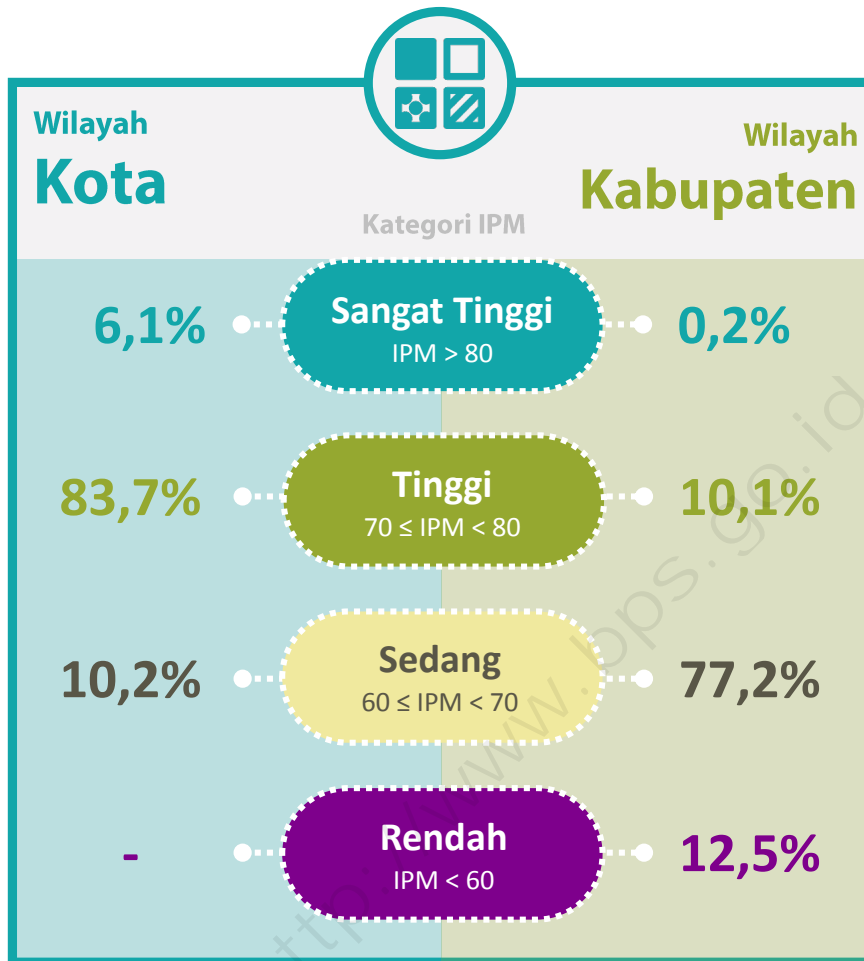
Di tahun yang sama, perbedaan kemajuan antara kota dengan kabupaten di Indonesia begitu terlihat. Kota yang telah berstatus pembangunan manusia “tinggi” telah mencapai 6,1 persen. Sementara di wilayah kabupaten, hanya 0,2 persen kabupaten yang telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Ditambah lagi, masih terdapat sekitar 12,5 persen kabupaten yang berstatus pembangunan manusia “rendah”. Tetapi, kota dengan status pembangunan manusia “rendah” tidak dijumpai.

Kesenjangan pembangunan manusia antara kota dengan kabupaten cukup terlihat jelas dalam fenomena pembangunan di Indonesia. Tahun 2014 misalnya, IPM Kota Yogyakarta (DI Yogyakarta) dengan Kota Subulussalam (Aceh) hanya berjarak 23,39. Bandingkan dengan kondisi di wilayah kabupaten. Jarak IPM antara Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) dengan Kabupaten Nduga (Papua) mencapai 55,35. Artinya, kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di kabupaten dua kali lipat lebih parah dibanding apa yang terjadi di wilayah kota.

Dalam empat tahun terakhir, perkembangan tingkat kesenjangan yang terjadi di kota dan kabupaten mengalami dinamika. Kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di kota selama 2010 hingga 2014 cenderung turun, tetapi dengan perkembangan yang lambat. Jarak antara IPM tertinggi dan terendah di kota turun dari 23,75 pada tahun 2010 menjadi 23,39 pada tahun 2014. Sementara itu, kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di kabupaten juga cenderung turun, namun dengan perkembangan yang cepat. Tahun 2010, kesenjangan antara IPM tertinggi dan terendah di kabupaten masih berjarak 60,07. Kemudian, pada tahun 2014 jaraknya telah mengecil menjadi hanya 55,35.

Fenomena kesenjangan di kota dan kabupaten juga terjadi pada semua dimensi pembangunan manusia, baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup yang layak. Selama tahun 2010 hingga 2014, kesenjangan yang terjadi di kota jauh lebih kecil bila dibanding dengan kesenjangan yang terjadi di kabupaten. Hal ini terjadi pada semua dimensi, kecuali dimensi standar hidup yang layak. Fenomena yang menarik justru terjadi pada dimensi ini dimana kesenjangan yang terjadi di kota lebih tinggi bila dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di kabupaten.

Gambar 5.12 IPM Indonesia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2014



Kesenjangan angka harapan hidup yang terjadi di kabupaten hampir dua kali lipat dibanding kesenjangan di kabupaten. Tahun 2014, jarak antara angka harapan hidup tertinggi dan terendah di kota hanya sebesar 15,78 tahun. Sementara itu, perbedaan capaian angka harapan hidup tertinggi dan terendah di kabupaten mencapai 23,85 tahun. Dalam empat tahun terakhir, kesenjangan angka harapan hidup yang terjadi di kota maupun kabupaten semakin mengecil. Perbaikan kesenjangan di kabupaten cenderung lebih cepat dibanding dengan kota. Secara rata-rata, kesenjangan angka harapan hidup di kabupaten turun 0,91 persen per tahun, sementara penurunan di kota hanya 0,68 persen per tahun.

Dimensi berikutnya yang cukup penting adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kesenjangan harapan lama sekolah yang terjadi di kabupaten hampir tiga kali lebih besar dibanding kesenjangan di kota. Tahun 2014, jarak antara harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di kota hanya 5,06 tahun. Akan tetapi, jarak antara harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di kabupaten mencapai 13,48 tahun. Menariknya, perbaikan kesenjangan harapan lama sekolah di kabupaten lebih lambat dibanding di kota. Artinya, program yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi sekolah di kabupaten dengan capaian harapan lama sekolah yang rendah perlu dilakukan secara intensif.

Kesenjangan rata-rata lama sekolah yang terjadi di kabupaten hampir dua kali lebih parah dibanding kesenjangan di kota. Tahun 2014 misalnya, perbedaan antara rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah di kota hanya 5,60 tahun. Sementara perbedaan di kabupaten mencapai 9,65 tahun. Fenomena ini diperparah dengan kondisi selama empat tahun terakhir yang menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan di kabupaten. Tercatat bahwa selama tahun 2010 hingga 2014, kesenjangan rata-rata lama sekolah di kabupaten cenderung meningkat. Akan tetapi, kesenjangan rata-rata lama sekolah di kota justru semakin membaik.

Diantara ketiga dimensi pembangunan manusia, nampaknya dimensi standar hidup yang layak memiliki fenomena yang cukup menarik. Kesenjangan pengeluaran per kapita yang terjadi di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di kabupaten dengan angka yang hampir mendekati. Namun perkembangan kesenjangan keduanya selama empat tahun justru cenderung semakin memburuk. Dengan demikian, dimensi ini juga perlu mendapat perhatian khusus agar kesenjangan pembangunan manusianya tidak semakin melebar.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2011. Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010. Jakarta: CV. Rioma.
- _____. 2012. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011. Jakarta: CV. Rioma
- _____. 2013. Indeks Pembangunan Manusia 2012. Jakarta: CV. Rioma
- _____. Statistik Indonesia 2015. Jakarta: BPS.
- Hinde, Andrew. 1998. Demographic Method. London: Arnold.
- H. Preston, Samuel, et. all. 2004. Demography: Measuring and Modelling Population Processes. USA: Blackwell.
- Imawan, Wynandin dan Uzair Suhaimi. 1997. Status dan Perkembangan Upaya Pembangunan Manusia di Indonesia: Perbandingan Antar Provinsi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kemenko Bidang Perekonomian. 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia; Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Meneg PP dan BPS. 2008. Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007. Jakarta.
- Rao, D. S. Prasada. The Country-Product-Dummy Method: A Stochastic Approach to the Computation of Purchasing Power Parities in the ICP. Working Paper Series No. 03/2004. Australia: CEPA
- Ritonga, Razali. (20 Desember 2006). Indeks Pembangunan Manusia. Kompas. Opini hal. 4.
- Siegel, Jacob. 2002. Applied Demographic. USA: Academic Press.
- UNDP, BPS, dan Bappenas. 2001. Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001: Demokrasi dan Pembangunan Manusia.
- _____. 2004. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004: Ekonomi dari Demokrasi.
- United Nations Development Programme. 1993. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 1990. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 2009. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 2010. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 2011. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 2014. Human Development Report. New York: UNDP.

Tim Laporan

Indeks Pembangunan Manusia 2014

Pengarah

Suhariyanto
Margo Yuwono

Editor

Harmawanti Marhaeni
Yoyo Karyono

Penulis

Adi Nugroho
Ema Tusianti

Pengolah Data

Adi Nugroho
Nur Putri Cahyo Utami

Desain Cover

Zulhan Rudyansyah
Adi Nugroho
Taufan Tirtayasa

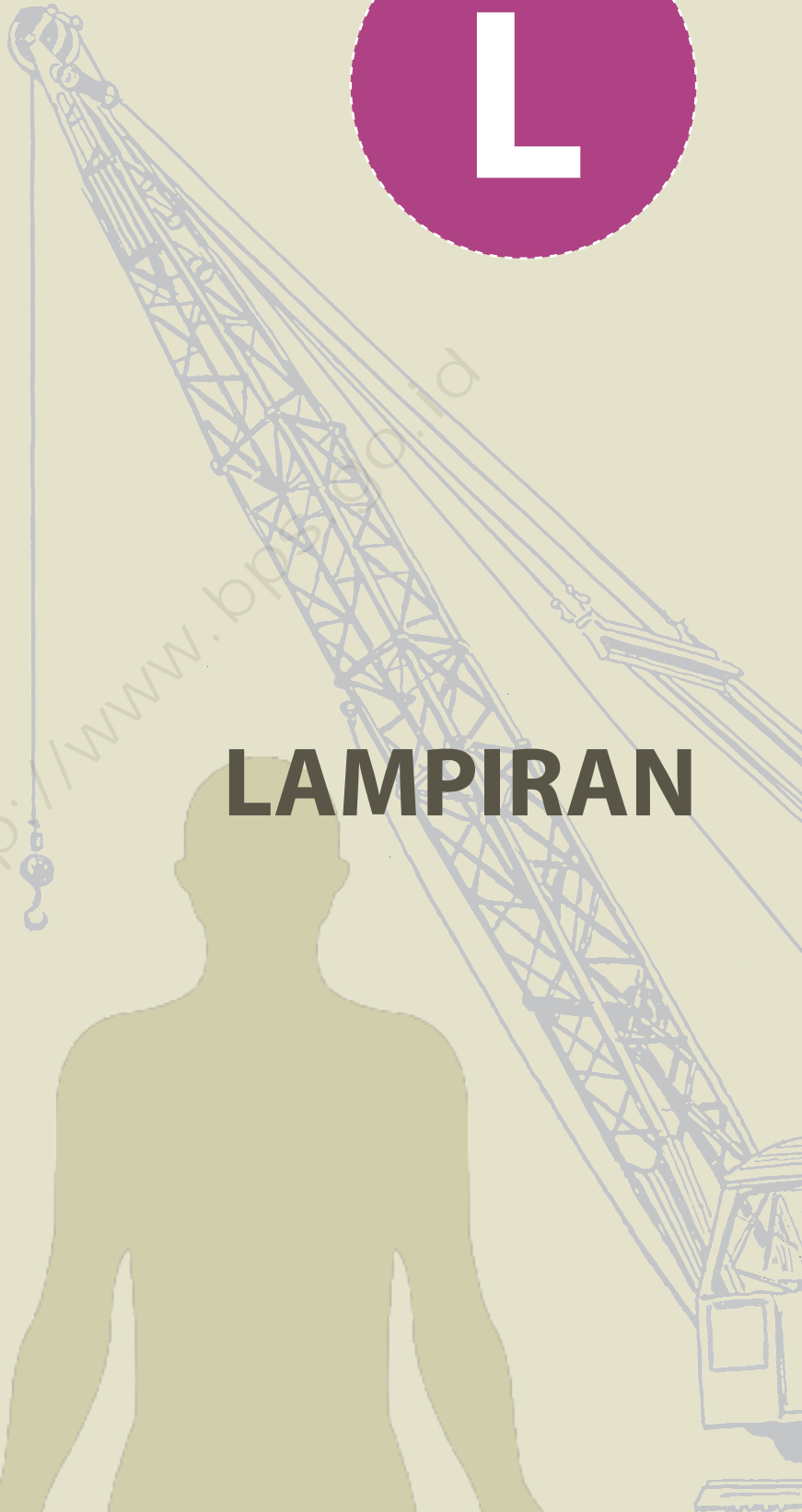
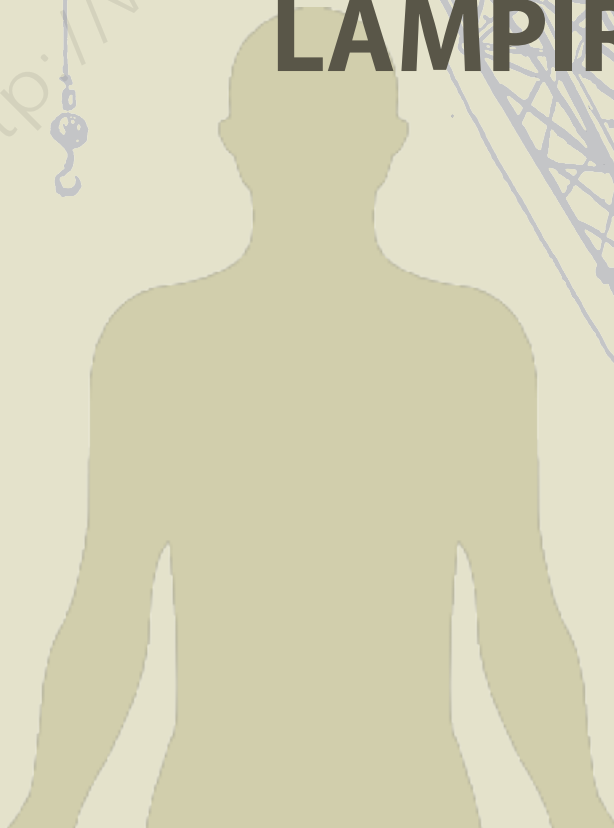
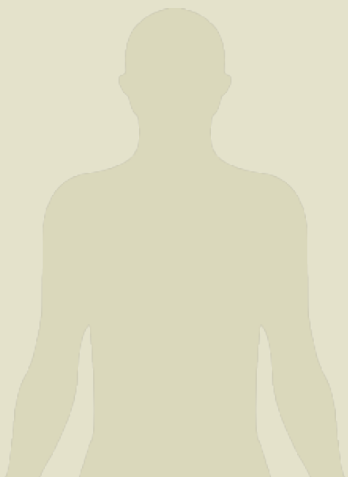
Desain Layout

Adi Nugroho



<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
ACEH	69,35	13,53	8,71	8.297	68,81	0,74
SUMATERA UTARA	68,04	12,61	8,93	9.391	68,87	0,74
SUMATERA BARAT	68,32	13,48	8,29	9.621	69,36	0,64
RIAU	70,76	12,45	8,47	10.262	70,33	0,60
JAMBI	70,43	12,38	7,92	9.141	68,24	0,71
SUMATERA SELATAN	68,93	11,75	7,66	9.302	66,75	0,88
BENGKULU	68,37	13,01	8,28	8.864	68,06	0,82
LAMPUNG	69,66	12,24	7,48	8.476	66,42	1,05
KEP. BANGKA BELITUNG	69,72	11,18	7,35	11.691	68,27	0,52
KEPULAUAN RIAU	69,15	12,51	9,64	13.019	73,40	0,52
DKI JAKARTA	72,27	12,38	10,54	16.898	78,39	0,40
JAWA BARAT	72,23	12,08	7,71	9.447	68,80	0,80
JAWA TENGAH	73,88	12,17	6,93	9.640	68,78	1,12
D I YOGYAKARTA	74,50	14,85	8,84	12.294	76,81	0,48
JAWA TIMUR	70,45	12,45	7,05	10.012	68,14	0,88
BANTEN	69,13	12,31	8,19	11.150	69,89	0,61
BALI	71,20	12,64	8,11	12.831	72,48	0,53
NUSA TENGGARA BARAT	64,90	12,73	6,67	8.987	64,31	0,88
NUSA TENGGARA TIMUR	65,91	12,65	6,85	6.934	62,26	0,95
KALIMANTAN BARAT	69,76	11,89	6,83	8.175	64,89	0,91
KALIMANTAN TENGAH	69,39	11,93	7,82	9.682	67,77	0,53
KALIMANTAN SELATAN	67,47	11,96	7,60	10.748	67,63	0,68
KALIMANTAN TIMUR	73,62	13,17	9,04	11.019	73,82	0,83
KALIMANTAN UTARA	72,12	12,52	8,35	8.289	68,64	0,95
SULAWESI UTARA	70,94	12,16	8,86	9.628	69,96	0,67
SULAWESI TENGAH	67,18	12,71	7,89	8.602	66,43	0,97
SULAWESI SELATAN	69,60	12,90	7,49	9.723	68,49	0,84
SULAWESI TENGGARA	70,39	12,78	8,02	8.555	68,07	0,78
GORONTALO	67,00	12,49	6,97	8.762	65,17	0,73
SULAWESI BARAT	64,04	11,78	6,88	8.170	62,24	1,14
MALUKU	65,01	13,53	9,15	7.925	66,74	0,98
MALUKU UTARA	67,34	12,72	8,34	7.234	65,18	0,63
PAPUA BARAT	65,14	11,87	6,96	6.944	61,28	0,61
PAPUA	64,84	9,94	5,76	6.416	56,75	0,89
INDONESIA	70,59	12,39	7,73	9.903	68,90	0,87

Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota, 2014

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
ACEH	69,35	13,53	8,71	8.297	68,81	0,74
Simeulue	64,24	12,75	8,89	5.956	62,18	0,81
Aceh Singkil	66,94	14,05	7,48	7.221	65,27	0,61
Aceh Selatan	63,18	13,05	7,60	7.003	62,35	0,13
Aceh Tenggara	67,07	13,59	8,77	6.949	65,90	0,54
Aceh Timur	68,06	11,83	7,38	7.288	63,57	0,48
Aceh Tengah	68,38	14,11	9,31	9.435	70,96	0,63
Aceh Barat	67,33	14,35	8,17	7.771	67,31	0,67
Aceh Besar	69,46	14,35	9,61	8.622	71,06	0,65
Pidie	66,28	13,50	8,25	9.182	67,87	0,41
Bireuen	70,35	14,25	8,85	7.319	68,71	0,71
Aceh Utara	68,42	13,99	8,06	6.838	65,93	0,86
Aceh Barat Daya	63,72	13,11	7,89	7.059	63,08	0,73
Gayo Lues	64,44	13,03	7,04	7.742	63,34	0,18
Aceh Tamiang	68,67	13,27	7,71	7.569	66,09	0,80
Nagan Raya	68,29	13,42	7,93	7.084	65,58	0,54
Aceh Jaya	66,48	13,81	7,88	8.721	67,30	0,57
Bener Meriah	68,64	13,02	9,00	9.721	70,00	0,38
Pidie Jaya	69,13	14,03	8,30	9.260	69,89	0,91
Kota Banda Aceh	70,80	16,36	12,37	14.766	82,22	0,47
Kota Sabang	69,54	12,39	10,35	9.823	71,50	0,60
Kota Langsa	68,79	14,58	10,48	10.284	73,81	0,56
Kota Lhokseumawe	70,62	15,11	10,39	9.678	74,44	0,42
Kota Subulussalam	62,87	13,30	6,77	6.326	60,39	0,47
SUMATERA UTARA	68,04	12,61	8,93	9.391	68,87	0,74
Nias	68,87	11,45	4,75	5.980	57,98	0,96
Mandailing Natal	61,18	12,57	7,54	9.040	63,42	0,82
Tapanuli Selatan	63,14	13,04	8,22	10.593	67,22	0,69
Tapanuli Tengah	66,49	12,21	7,55	9.489	66,16	0,79
Tapanuli Utara	67,25	13,14	9,05	10.964	70,70	0,29
Toba Samosir	69,04	13,16	9,83	11.250	72,79	0,59
Labuhan Batu	69,26	12,56	8,68	10.325	70,06	0,88
Asahan	67,27	12,15	7,98	9.988	67,51	1,40
Simalungun	70,24	12,63	8,70	10.597	70,89	0,87
Dairi	67,48	12,05	8,59	9.642	67,91	1,13
Karo	70,42	11,89	9,33	11.548	71,84	0,31
Deli Serdang	70,80	12,11	9,46	11.065	71,98	0,82
Langkat	67,33	12,69	7,85	10.062	68,00	1,23

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Nias Selatan	67,16	11,48	4,64	6.329	57,78	1,75
Humbang Hasundutan	67,80	13,13	8,88	6.736	65,59	1,03
Pakpak Barat	64,45	13,78	8,39	7.364	65,06	0,50
Samosir	69,66	13,39	8,57	7.667	67,80	1,49
Serdang Bedegai	67,27	12,29	8,04	10.042	67,78	0,99
Batu Bara	65,50	11,94	7,72	9.370	65,50	0,68
Padang Lawas Utara	66,40	11,84	8,44	9.171	66,50	0,56
Padang Lawas	66,01	12,90	8,16	7.910	65,50	1,36
Labuhan Batu Selatan	68,06	11,88	8,67	10.111	68,59	1,19
Labuhan Batu Utara	68,50	11,80	8,27	11.147	69,15	1,28
Nias Utara	68,49	11,86	6,05	5.580	59,18	1,53
Nias Barat	67,64	11,87	5,73	5.156	57,54	1,69
Kota Sibolga	67,40	12,76	9,83	10.623	71,01	0,80
Kota Tanjung Balai	61,40	12,25	9,03	10.133	66,05	0,99
Kota Pematang Siantar	71,69	13,97	10,70	11.204	75,83	1,04
Kota Tebing Tinggi	70,04	12,04	10,05	10.918	72,13	0,39
Kota Medan	72,18	13,69	10,88	13.984	78,26	0,34
Kota Binjai	71,39	13,00	9,77	10.058	72,55	0,74
Kota Padang Sidempuan	68,27	13,95	10,13	9.623	71,88	0,28
Kota Gunung Sitoli	70,19	13,28	8,17	6.685	65,91	1,02
SUMATERA BARAT	68,32	13,48	8,29	9.621	69,36	0,64
Kepulauan Mentawai	63,55	11,35	6,19	5.566	56,73	0,71
Pesisir Selatan	69,46	13,02	8,10	8.368	67,75	0,65
Solok	66,95	12,53	7,56	9.228	66,44	0,44
Sawah Lunto/Sijunjung	64,72	11,91	7,32	9.726	64,95	0,72
Tanah Datar	68,35	12,82	7,80	10.014	68,51	0,57
Padang Pariaman	67,24	13,54	6,88	9.990	67,56	0,62
Agam	70,80	13,58	8,10	8.692	69,32	0,86
Limapuluh Koto	69,22	12,41	7,59	8.672	66,78	0,72
Pasaman	65,76	12,69	7,62	7.058	63,33	0,66
Solok Selatan	66,04	12,15	7,97	9.390	66,29	0,65
Dharmas Raya	69,76	12,19	7,99	10.550	69,27	0,81
Pasaman Barat	66,93	12,29	7,53	7.897	64,56	0,99
Kota Padang	73,18	15,20	10,93	13.387	79,83	0,75
Kota Solok	72,34	14,26	10,75	10.927	76,20	0,87
Kota Sawah Lunto	69,17	12,68	9,65	8.780	69,61	0,77
Kota Padang Panjang	72,44	14,73	10,79	9.369	75,05	0,67
Kota Bukit Tinggi	73,12	14,65	10,71	12.137	78,02	0,46
Kota Payakumbuh	72,43	14,18	9,96	12.296	76,49	0,20
Kota Pariaman	69,49	14,48	9,94	11.541	74,66	0,21
RIAU	70,76	12,45	8,47	10.262	70,33	0,60
Kuantan Sengingi	67,66	11,96	8,17	9.719	67,47	1,22

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Indragiri Hulu	69,64	11,51	7,55	9.726	67,11	0,65
Indragiri Hilir	66,54	10,67	6,81	9.738	63,80	0,58
Pelalawan	70,13	11,02	7,82	11.391	68,67	0,56
Siak	70,54	11,81	9,05	11.531	71,45	0,86
Kampar	69,80	12,72	8,62	10.651	70,72	0,37
Rokan Hulu	68,93	12,36	7,83	8.786	67,02	1,43
Bengkalis	70,38	12,35	8,80	10.661	70,84	0,34
Rokan Hilir	69,27	11,42	7,62	9.051	66,22	1,16
Kepulauan Meranti	66,42	12,34	7,44	6.945	62,91	0,60
Kota Pekanbaru	71,55	14,07	10,95	14.023	78,42	0,33
Kota Dumai	70,05	12,40	9,56	10.870	71,86	0,38
JAMBI	70,43	12,38	7,92	9.141	68,24	0,71
Kerinci	69,20	13,15	7,77	8.865	67,96	0,70
Merangin	70,92	11,38	7,04	9.108	66,21	0,59
Sarolangun	68,67	11,73	7,23	10.985	67,67	0,80
Batanghari	69,65	12,69	7,43	9.220	67,68	0,65
Muara Jambi	70,71	12,42	7,68	7.297	65,71	0,88
Tanjung Jabung Timur	65,33	10,73	5,93	7.699	59,88	0,80
Tanjung Jabung Barat	67,46	11,58	7,28	8.105	64,04	0,79
Tebo	69,65	11,70	7,48	9.145	66,63	1,09
Bungo	66,68	12,53	7,86	10.481	67,93	0,58
Kota Jambi	72,31	13,62	10,62	10.355	74,86	0,87
Kota Sungai Penuh	71,51	14,57	9,05	9.328	72,48	0,53
SUMATERA SELATAN	68,93	11,75	7,66	9.302	66,75	0,88
Ogan Komering Ulu	67,60	11,99	7,91	8.848	66,21	1,06
Ogan Komering Ilir	67,99	10,78	6,44	9.517	63,87	0,55
Muara Enim (Liot)	67,70	11,48	7,19	9.051	65,02	1,07
Lahat	64,17	12,25	7,86	8.628	64,52	0,58
Musi Rawas	66,88	11,10	6,61	8.787	63,19	1,55
Musi Banyuasin	67,99	11,57	7,18	8.772	64,93	1,17
Banyuasin	68,21	10,87	6,87	8.218	63,21	1,27
Ogan Komering Ulu Selatan	65,78	11,21	7,30	7.380	61,94	0,60
Ogan Komering Ulu Timur	67,79	11,66	7,05	10.767	66,74	0,99
Ogan Ilir	64,38	11,63	7,34	9.689	64,49	1,32
Empat Lawang	63,98	11,84	7,14	8.656	63,17	0,69
Penukal Abab Lematang Ilir	67,55	10,13	6,50	6.941	59,89	0,34
Musi Rawas Utara	64,69	10,89	6,06	8.892	61,34	1,28
Kota Palembang	69,80	13,67	10,23	13.624	76,02	0,70
Kota Prabumulih	69,39	12,21	9,60	11.775	72,20	0,46
Kota Pagar Alam	65,50	12,78	8,61	7.273	64,75	0,96
Kota Lubuk Linggau	68,49	13,26	9,32	12.233	72,84	0,40
BENGKULU	68,37	13,01	8,28	8.864	68,06	0,82

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Bengkulu Selatan	67,06	13,42	8,75	8.777	68,28	0,99
Rejang Lebong	67,42	12,76	7,60	8.869	66,55	0,67
Bengkulu Utara	67,38	12,78	7,80	9.293	67,27	0,89
Kaur	65,46	12,82	7,76	7.232	63,75	0,91
Seluma	66,40	12,55	7,37	6.894	62,94	1,35
Mukomuko	65,83	12,10	7,40	9.269	65,31	0,80
Lebong	62,01	11,39	7,62	10.210	63,90	1,19
Kepahiang	66,65	12,30	7,50	8.545	65,22	1,22
Bengkulu Tengah	67,61	12,35	6,86	7.885	64,10	0,61
Kota Bengkulu	69,46	14,36	11,44	11.873	76,49	0,43
LAMPUNG	69,66	12,24	7,48	8.476	66,42	1,05
Lampung Barat	66,02	11,36	7,25	8.459	63,54	0,52
Tanggamus	67,12	11,49	6,63	7.880	62,67	1,27
Lampung Selatan	68,12	10,98	7,01	8.441	63,75	0,63
Lampung Timur	69,33	12,38	7,16	8.814	66,42	0,53
Lampung Tengah	68,91	12,16	7,06	9.935	67,07	0,75
Lampung Utara	68,02	12,38	7,69	7.567	64,89	1,38
Way Kanan	68,21	11,96	6,76	8.278	64,32	0,62
Tulang Bawang	68,94	11,11	7,10	9.796	65,83	1,42
Pesawaran	67,33	11,44	7,21	6.680	61,70	1,25
Pringsewu	68,01	12,47	7,53	8.992	66,58	0,66
Mesuji	67,05	10,34	5,80	6.764	58,71	0,94
Tulang Bawang Barat	68,98	11,29	6,81	7.137	62,46	1,62
Pesisir Barat	61,74	11,12	7,36	7.169	59,76	1,38
Kota Bandar Lampung	70,55	13,31	10,85	10.702	74,34	0,56
Kota Metro	70,98	14,25	10,54	10.606	74,98	0,95
KEP. BANGKA BELITUNG	69,72	11,18	7,35	11.691	68,27	0,52
Bangka	70,47	12,33	7,92	10.679	69,79	0,64
Belitung	70,22	10,77	8,07	12.375	69,56	0,42
Bangka Barat	69,46	10,99	6,57	11.154	66,43	0,88
Bangka Tengah	69,98	11,40	6,68	12.170	68,09	0,63
Bangka Selatan	66,56	10,86	5,87	10.633	63,54	0,92
Belitung Timur	71,03	10,94	7,89	10.272	68,10	0,57
Kota Pangkal Pinang	72,31	12,74	9,63	14.619	76,28	0,18
KEPULAUAN RIAU	69,15	12,51	9,64	13.019	73,40	0,52
Karimun	69,01	11,86	7,73	11.090	68,72	0,30
Bintan	69,91	11,80	8,30	13.477	71,65	0,49
Natuna	63,24	13,84	8,07	13.414	70,06	0,97
Lingga	59,47	11,59	5,53	10.949	60,75	1,03
Kepulauan Anambas	66,23	11,62	6,16	11.182	65,12	0,40
Kota Batam	72,80	12,62	10,80	16.735	79,13	0,61
Kota Tanjung Pinang	71,55	14,03	9,94	14.141	77,29	0,77

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
DKI JAKARTA	72,27	12,38	10,54	16.898	78,39	0,40
Kep. Seribu	67,22	11,89	8,03	11.316	68,48	1,26
Kota Jakarta Selatan	73,81	13,09	10,97	22.208	82,94	0,26
Kota Jakarta Timur	74,00	13,06	11,21	16.248	80,40	0,65
Kota Jakarta Pusat	73,60	12,51	10,87	15.922	79,03	0,28
Kota Jakarta Barat	73,22	12,39	10,13	18.897	79,38	0,74
Kota Jakarta Utara	72,81	11,89	9,85	16.959	77,29	0,16
JAWA BARAT	72,23	12,08	7,71	9.447	68,80	0,80
Bogor	70,49	11,81	7,74	9.066	67,36	0,92
Sukabumi	69,73	12,12	6,36	7.824	64,07	0,69
Cianjur	69,08	11,82	6,52	6.733	62,08	0,66
Bandung	72,97	11,74	8,34	8.999	69,06	0,70
Garut	70,49	11,62	6,83	6.372	62,23	0,92
Tasikmalaya	67,96	12,41	6,87	6.830	62,79	0,62
Ciamis	70,34	13,57	7,44	8.162	67,64	0,66
Kuningan	72,24	12,01	7,04	8.393	66,63	0,71
Cirebon	71,28	11,60	6,31	9.013	65,53	0,72
Majalengka	68,66	11,61	6,75	8.233	64,07	0,57
Sumedang	71,89	12,89	7,66	8.844	68,76	0,41
Indramayu	70,29	11,62	5,45	8.668	63,55	0,92
Subang	71,22	11,44	6,44	9.287	65,80	0,48
Purwakarta	69,96	11,33	7,17	10.521	67,32	0,35
Karawang	71,45	11,64	6,78	9.768	67,08	0,70
Bekasi	73,16	11,73	8,38	10.232	70,51	0,60
Bandung Barat	71,56	11,06	7,51	7.188	64,27	0,53
Pangandaran	69,84	11,89	7,05	8.232	65,29	0,86
Kota Bogor	72,58	12,23	10,01	10.532	73,10	0,32
Kota Sukabumi	71,76	13,18	8,70	9.641	71,19	0,53
Kota Bandung	73,80	13,33	10,51	15.048	78,98	0,54
Kota Cirebon	71,77	12,93	9,53	10.606	72,93	0,91
Kota Bekasi	74,18	13,28	10,55	14.558	78,84	0,26
Kota Depok	73,96	13,30	10,58	14.239	78,58	0,40
Kota Cimahi	73,56	13,71	10,78	10.681	76,06	0,28
Kota Tasikmalaya	70,96	13,36	8,51	8.210	69,04	0,60
Kota Banjar	70,24	12,42	7,77	9.439	68,34	0,48
JAWA TENGAH	73,88	12,17	6,93	9.640	68,78	1,12
Cilacap	72,80	12,27	6,48	9.091	67,25	0,66
Banyumas	72,92	12,56	7,31	9.580	69,25	1,02
Purbalingga	72,80	11,51	6,84	8.539	66,23	1,07
Banjarnegara	73,39	10,70	5,90	7.684	63,15	0,50
Kebumen	72,67	12,07	6,75	7.755	65,67	1,23
Purworejo	73,83	13,03	7,63	9.189	70,12	0,50

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Wonosobo	70,82	11,34	6,07	9.491	65,20	0,98
Magelang	73,25	12,00	7,02	7.877	66,35	0,75
Boyolali	75,61	11,65	6,69	11.504	70,34	0,76
Klaten	76,54	12,74	7,92	10.965	73,19	1,07
Sukoharjo	77,45	12,96	8,41	10.264	73,76	0,74
Wonogiri	75,84	11,94	6,23	8.249	66,77	0,55
Karanganyar	76,71	13,26	8,47	10.313	73,89	0,77
Sragen	75,31	12,19	6,85	10.876	70,52	0,82
Grobogan	74,07	12,24	6,32	9.303	67,77	0,50
Blora	73,84	11,75	6,02	8.568	65,84	0,72
Rembang	74,19	11,46	6,90	9.013	67,40	0,84
Pati	75,43	11,24	6,35	9.106	66,99	0,78
Kudus	76,40	12,58	7,83	10.102	72,00	0,58
Jepara	75,64	12,25	7,29	9.195	69,61	0,73
Demak	75,18	11,84	7,44	9.003	68,95	0,84
Semarang	75,50	12,81	7,31	10.586	71,65	0,51
Temanggung	75,34	11,69	6,18	8.062	65,97	0,69
Kendal	74,14	11,83	6,53	10.126	68,46	0,70
Batang	74,40	10,65	6,00	8.012	64,07	0,74
Pekalongan	73,33	11,93	6,53	8.938	66,98	1,08
Pemalang	72,64	11,26	5,87	6.911	62,35	0,87
Tegal	70,80	11,99	5,93	8.050	64,10	0,94
Brebes	67,90	11,03	5,86	8.784	62,55	1,10
Kota Magelang	76,57	12,98	10,27	10.344	75,79	0,66
Kota Surakarta	76,99	13,92	10,33	12.907	79,34	0,57
Kota Salatiga	76,53	14,95	9,37	14.205	79,98	0,77
Kota Semarang	77,18	13,97	10,19	12.802	79,24	0,70
Kota Pekalongan	74,09	11,93	8,12	11.006	71,53	1,00
Kota Tegal	74,10	11,96	8,26	11.519	72,20	1,06
DI YOGYAKARTA	74,50	14,85	8,84	12.294	76,81	0,48
Kulon Progo	74,90	13,27	8,20	8.480	70,68	0,76
Bantul	73,24	14,62	8,74	13.921	77,11	0,44
Gunung Kidul	73,39	12,82	6,45	8.235	67,03	1,09
Sleman	74,47	15,64	10,28	14.170	80,73	0,59
Kota Yogyakarta	74,05	15,97	11,39	16.755	83,78	0,21
JAWA TIMUR	70,45	12,45	7,05	10.012	68,14	0,88
Pacitan	70,75	11,61	6,43	7.656	63,81	0,68
Ponorogo	71,88	13,04	6,91	8.383	67,40	0,56
Trenggalek	72,51	11,64	6,87	8.417	66,16	0,60
Tulungagung	72,88	12,72	7,45	9.505	69,49	0,28
Blitar	72,50	11,49	6,82	9.245	66,88	0,59
Kediri	72,04	12,01	7,41	9.633	68,44	0,64

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Malang	71,78	11,25	6,66	8.817	65,59	0,61
Lumajang	69,07	11,12	6,03	7.895	62,33	0,74
Jember	67,80	12,00	5,63	8.227	62,64	0,34
Banyuwangi	69,93	11,81	6,87	10.379	67,31	0,86
Bondowoso	65,43	12,85	5,52	9.176	63,43	0,35
Situbondo	68,08	12,97	5,54	8.383	63,91	0,76
Probolinggo	65,75	11,60	5,64	9.877	63,04	0,69
Pasuruan	69,83	11,78	6,36	8.293	64,35	0,95
Sidoarjo	73,43	13,55	10,09	12.632	76,78	0,52
Mojokerto	71,76	11,97	7,74	11.208	70,22	0,56
Jombang	71,37	12,65	7,52	9.709	69,07	0,64
Nganjuk	70,87	12,65	7,31	10.754	69,59	0,88
Madiun	69,76	12,79	6,89	10.667	68,60	0,79
Magetan	71,91	12,77	7,55	10.539	70,29	0,62
Ngawi	71,33	12,29	6,52	10.143	67,78	0,79
Bojonegoro	70,11	12,08	6,14	8.964	65,27	0,65
Tuban	70,25	11,42	6,18	8.906	64,58	0,69
Lamongan	71,47	13,41	7,27	9.545	69,42	0,76
Gresik	72,20	13,17	8,42	11.514	72,84	0,52
Bangkalan	69,62	11,17	5,07	7.459	60,71	0,87
Sampang	67,48	10,39	3,49	7.798	56,98	0,94
Pamekasan	66,56	13,32	5,72	7.478	62,66	0,63
Sumenep	70,02	12,39	4,77	7.143	61,43	0,97
Kota Kediri	73,52	13,52	9,70	10.702	74,62	0,59
Kota Blitar	72,70	13,51	9,81	11.672	75,26	0,98
Kota Malang	72,30	14,47	9,97	15.399	78,96	0,66
Kota Probolinggo	69,52	13,29	8,44	10.182	70,49	0,63
Kota Pasuruan	70,54	13,53	9,06	11.527	73,23	0,46
Kota Mojokerto	72,39	13,30	9,91	11.689	75,04	0,17
Kota Madiun	72,41	13,64	10,90	14.643	78,81	0,51
Kota Surabaya	73,85	13,44	10,07	15.492	78,87	0,46
Kota Batu	72,06	12,90	8,41	10.853	71,89	0,48
BANTEN	69,13	12,31	8,19	11.150	69,89	0,61
Pandeglang	62,91	13,38	6,45	7.589	62,06	1,16
Lebak	65,88	11,88	5,84	7.977	61,64	0,82
Tangerang	68,98	11,65	8,20	11.666	69,57	0,42
Serang	63,09	12,35	6,69	9.886	63,97	0,63
Kota Tangerang	71,09	12,86	10,20	13.671	75,87	1,10
Kota Cilegon	65,85	13,07	9,66	12.057	71,57	0,81
Kota Serang	67,23	12,34	8,58	12.091	70,26	0,81
Kota Tangerang Selatan	72,11	13,58	11,56	14.361	79,17	0,67
BALI	71,20	12,64	8,11	12.831	72,48	0,53

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Jembrana	71,39	11,48	7,30	10.944	68,67	0,42
Tabanan	72,64	12,04	7,91	13.492	72,68	0,51
Badung	74,30	13,00	9,29	16.080	77,98	0,46
Gianyar	72,78	13,06	8,28	13.382	74,29	0,40
Klungkung	69,91	12,57	6,90	10.501	68,30	0,32
Bangli	69,44	11,15	6,38	10.469	65,75	0,43
Karangasem	69,18	11,81	5,39	9.402	64,01	0,49
Buleleng	70,71	12,01	6,66	12.249	69,16	0,49
Kota Denpasar	73,71	13,46	10,96	18.605	81,65	0,40
NUSA TENGGARA BARAT	64,90	12,73	6,67	8.987	64,31	0,88
Lombok Barat	64,50	12,09	5,63	10.470	63,52	0,97
Lombok Tengah	64,45	12,36	5,52	8.652	61,88	1,03
Lombok Timur	64,04	13,10	6,06	7.750	62,07	1,05
Sumbawa	65,72	11,94	7,31	7.519	62,88	0,69
Dompu	65,06	13,16	7,45	7.239	63,53	0,58
Bima	64,56	12,70	7,29	7.198	62,61	0,85
Sumbawa Barat	65,85	13,21	7,44	9.922	67,19	0,48
Lombok Utara	65,19	12,31	4,97	7.594	60,17	1,63
Kota Mataram	70,18	15,27	9,04	13.021	75,93	0,96
Kota Bima	69,03	14,92	9,58	9.352	72,23	0,71
NUSA TENGGARA TIMUR	65,91	12,65	6,85	6.934	62,26	0,95
Sumba Barat	66,11	12,11	6,38	6.714	60,90	0,57
Sumba Timur	63,48	12,02	6,14	8.808	62,04	0,97
Kupang	62,97	13,45	6,84	6.945	61,68	1,00
Timor Tengah Selatan	65,45	12,51	5,98	6.061	59,41	1,10
Timor Tengah Utara	65,89	13,24	6,69	5.679	60,41	1,43
Belu	62,31	11,41	7,03	7.025	59,72	1,01
Alor	59,73	11,25	7,74	6.284	58,00	0,83
Lembata	65,35	11,50	7,44	6.857	61,45	1,47
Flores Timur	63,88	11,49	6,86	7.099	60,42	1,04
Sikka	65,70	11,38	6,53	7.559	61,36	0,85
Ende	64,27	13,71	7,30	8.551	65,25	0,95
Ngada	67,32	11,99	7,51	8.070	64,64	0,33
Manggarai	64,78	11,29	6,79	6.790	60,08	1,00
Rote Nda	62,86	12,20	6,16	5.873	57,82	0,94
Manggarai Barat	65,98	10,15	6,80	6.937	59,64	1,05
Sumba Barat Daya	67,08	12,59	6,01	5.880	59,90	1,08
Sumba Tengah	67,65	11,44	5,10	5.788	57,60	0,61
Nageko	66,05	11,39	7,14	7.868	62,71	0,77
Manggarai Timur	67,27	10,15	6,42	5.208	56,58	1,50
Sabu Raijua	57,98	12,18	5,54	4.748	52,51	1,88
Malaka	64,15	11,56	6,07	5.512	56,94	1,42

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Kota Kupang	68,14	15,55	11,41	12.766	77,58	0,44
KALIMANTAN BARAT	69,76	11,89	6,83	8.175	64,89	0,91
Sambas	67,74	11,46	5,80	9.153	63,28	1,30
Bengkayang	72,89	11,11	5,97	8.363	64,40	0,65
Landak	71,97	12,00	7,05	6.417	63,59	1,38
Pontianak	70,28	11,75	6,33	7.063	62,78	1,11
Sanggau	70,28	10,60	6,37	7.411	62,06	0,55
Ketapang	70,51	10,90	6,22	8.159	63,27	0,67
Sintang	70,95	10,25	6,63	8.098	63,19	0,88
Kapuas Hulu	71,94	11,80	6,65	6.440	62,90	0,44
Sekadau	70,80	11,12	6,54	6.689	61,98	1,57
Melawai	72,38	10,65	6,00	7.727	62,89	0,98
Kayong Utara	67,03	10,89	5,19	6.769	58,52	1,03
Kubu Raya	69,64	12,34	6,41	7.973	64,52	0,91
Kota Pontianak	72,01	13,84	9,62	13.706	76,63	0,86
Kota Singkawang	70,84	12,80	7,26	10.950	69,84	1,02
KALIMANTAN TENGAH	69,39	11,93	7,82	9.682	67,77	0,53
Kotawaringin Barat	69,77	12,12	7,82	11.908	70,14	0,91
Kotawaringin Timur	69,41	12,04	7,69	10.430	68,45	0,72
Kapuas	68,30	11,14	6,94	9.726	65,29	0,73
Barito Selatan	66,08	11,14	8,27	10.374	66,61	0,61
Barito Utara	70,91	11,15	8,00	8.326	66,30	1,81
Sukamara	71,19	11,09	7,30	7.568	64,44	0,82
Lamandau	69,07	11,80	7,67	9.925	67,53	0,45
Seruyan	68,58	11,08	7,03	7.958	63,49	1,08
Katingan	64,98	11,69	8,23	9.542	65,79	0,76
Pulang Pisau	67,44	11,63	7,58	8.556	65,00	0,38
Gunung Mas	69,59	10,82	8,74	9.965	68,13	0,56
Barito Timur	67,41	11,98	9,01	10.465	69,12	0,44
Murung Raya	69,11	11,68	7,18	9.268	66,10	0,73
Kota Palangka Raya	72,95	14,89	10,73	12.521	78,50	0,62
KALIMANTAN SELATAN	67,47	11,96	7,60	10.748	67,63	0,68
Tanah Laut	68,22	11,09	7,27	10.632	66,50	0,58
Kota Baru	68,14	11,11	6,80	10.536	65,76	0,52
Banjar	65,32	10,99	6,96	12.004	65,71	0,54
Barito Kuala	64,49	11,54	6,47	8.936	62,56	0,72
Tapin	69,02	11,17	7,17	10.839	66,99	0,78
Hulu Sungai Selatan	63,64	11,68	7,21	11.077	65,25	1,02
Hulu Sungai Tengah	64,33	11,42	7,27	11.040	65,37	1,14
Hulu Sungai Utara	62,09	12,10	6,63	8.164	61,32	0,91
Tabalong	69,39	11,96	7,95	10.088	68,36	0,42
Tanah Bumbu	68,84	11,20	7,26	10.697	66,94	0,64

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Balangan	66,65	11,03	6,36	10.617	64,44	0,64
Kota Banjarmasin	70,02	13,73	9,88	12.501	74,94	0,48
Kota Banjar Baru	71,06	14,73	10,74	12.376	77,30	0,26
KALIMANTAN TIMUR	73,62	13,17	9,04	11.019	73,82	0,83
Pasir	71,88	12,63	7,99	9.706	69,87	0,36
Kutai Barat	72,03	12,14	7,98	9.262	68,91	1,15
Kutai	71,50	13,24	8,46	9.984	71,20	0,68
Kutai Timur	72,37	12,42	8,60	9.484	70,39	0,87
Berau	71,21	12,96	8,53	11.471	72,26	0,33
Penajam Paser Utara	70,48	11,69	7,46	10.807	68,60	0,78
Mahakam Ulu	71,12	11,87	7,15	7.071	64,32	0,80
Kota Balikpapan	73,94	13,43	10,41	13.439	77,93	0,52
Kota Samarinda	73,63	14,16	10,26	13.538	78,39	0,70
Kota Bontang	73,68	12,68	10,35	15.878	78,58	0,30
KALIMANTAN UTARA	72,12	12,52	8,35	8.289	68,64	0,95
Malinau	70,93	13,22	8,27	9.343	70,00	0,23
Bulongan	72,11	12,53	8,27	8.852	69,25	0,87
Tana Tidung	70,80	12,14	7,84	6.696	64,70	1,43
Nunukan	70,82	12,39	7,21	6.105	63,13	1,54
Kota Tarakan	73,50	13,39	9,90	10.581	74,60	1,38
SULAWESI UTARA	70,94	12,16	8,86	9.628	69,96	0,67
Bolaang Mongondow	68,02	10,90	7,13	9.107	64,53	0,58
Minahasa	70,25	12,83	9,53	11.320	72,76	1,15
Kep.Sangihe Talaud	69,07	11,09	7,34	10.460	66,82	1,02
Kepulauan Talaud	69,13	11,83	8,73	7.907	66,56	0,63
Minahasa Selatan	69,00	11,10	8,47	10.549	68,36	1,01
Minahasa Utara	70,79	11,85	9,07	10.339	70,54	0,50
Bolaang Mongondow Utara	66,64	11,84	7,51	8.131	64,24	0,90
Kep. Siau Tagulandang Biaro	69,29	10,89	8,18	7.442	64,35	0,69
Minahasa Tenggara	69,48	11,48	8,37	9.528	67,86	0,77
Bolaang Mongondow Selatan	63,87	12,19	7,68	8.183	63,57	1,17
Bolaang Mongondow Timur	67,11	11,04	7,28	7.965	63,12	0,75
Kota Manado	71,28	13,81	11,01	12.904	77,27	0,94
Kota Bitung	70,25	11,30	9,26	11.348	70,88	0,75
Kota Tomohon	70,45	13,68	10,20	10.367	73,56	0,78
Kota Kotamobago	69,64	12,30	9,75	9.546	70,46	0,86
SULAWESI TENGAH	67,18	12,71	7,89	8.602	66,43	0,97
Banggai Kepulauan	64,25	12,70	7,39	7.038	62,33	0,96
Banggai	69,73	12,32	7,71	8.718	67,11	1,09
Morowali	68,06	12,12	7,97	10.059	67,91	1,56
Poso	69,99	12,87	8,49	7.869	67,65	1,06
Donggala	65,79	12,41	7,80	7.237	63,55	0,27

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Toli-Toli	63,75	12,26	7,69	6.959	61,91	0,77
Buol	66,66	13,03	8,30	7.431	65,41	1,41
Parigi Moutong	63,17	11,72	6,71	8.723	62,20	0,36
Tojo Una-Una	63,87	11,28	7,62	7.111	61,15	1,38
Sigi	68,66	11,82	8,11	7.238	64,64	0,85
Banggai Laut	63,28	12,00	7,82	7.324	62,12	0,43
Morowali Utara	68,29	11,65	8,14	8.309	65,81	1,23
Kota Palu	69,93	15,15	11,17	14.413	79,12	0,60
SULAWESI SELATAN	69,60	12,90	7,49	9.723	68,49	0,84
Selayar	67,50	11,98	7,10	7.656	63,66	0,78
Bulukumba	66,43	12,31	6,66	9.618	65,24	1,52
Bantaeng	69,68	11,48	6,16	10.294	65,77	1,38
Jeneponto	65,39	11,68	5,63	8.417	61,45	1,49
Takalar	65,90	11,31	6,57	9.351	63,53	1,52
Gowa	69,78	12,45	6,99	8.515	66,12	1,03
Sinjai	66,36	11,96	7,03	8.272	63,83	0,56
Maros	68,50	12,37	7,17	9.355	66,65	0,88
Pangkajene Kepulauan	65,37	12,37	7,31	10.161	66,16	1,40
Barru	67,73	13,45	7,28	9.733	67,94	1,37
Bone	65,81	12,16	6,11	7.845	62,09	1,13
Soppeng	68,42	11,45	7,04	8.699	64,74	0,48
Wajo	65,93	13,05	6,36	10.778	66,49	1,07
Sidenreng Rappang	68,07	12,80	7,30	10.434	68,14	1,48
Pinrang	68,03	13,16	7,45	10.680	68,92	1,14
Enrekang	70,21	13,29	7,98	9.347	69,37	1,44
Luwu	69,14	12,87	7,60	8.764	67,34	1,44
Tana Toraja	72,11	12,89	7,81	6.214	65,08	0,82
Luwu Utara	67,00	12,09	7,19	10.605	66,90	0,75
Luwu Timur	69,44	11,95	7,80	11.859	69,75	0,32
Toraja Utara	72,50	12,61	7,70	6.955	66,15	0,76
Kota Makasar	71,38	14,75	10,64	15.079	79,35	0,47
Kota Pare Pare	70,39	14,04	9,95	12.692	75,66	0,75
Kota Palopo	70,12	15,01	9,96	11.713	75,65	0,83
SULAWESI TENGGARA	70,39	12,78	8,02	8.555	68,07	0,78
Buton	67,17	12,79	6,68	6.660	62,31	0,79
Muna	69,76	12,45	7,05	7.666	65,09	0,65
Konawe/Kab Kendari	69,35	12,22	8,58	9.396	68,68	0,66
Kolaka	69,80	11,89	8,17	11.699	70,20	0,92
Konawe Selatan	69,77	11,60	7,49	8.301	65,60	0,88
Bombana	67,62	11,76	7,50	7.236	63,38	0,90
Wakatobi	69,49	12,79	7,68	8.306	66,95	0,67
Kolaka Utara	69,19	10,80	7,46	9.489	65,76	0,64

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Buton Utara	70,36	11,94	7,91	6.850	64,65	0,71
Konawe Utara	68,59	11,53	8,22	8.397	66,03	0,74
Kolaka Timur	71,31	10,78	6,30	7.094	62,13	0,58
Konawe Kepulauan	67,86	10,16	8,70	6.039	61,31	0,27
Muna Barat	69,76	11,59	6,22	6.855	61,92	-
Buton Tengah	67,17	12,28	6,59	6.658	61,69	-
Buton Selatan	67,17	12,52	6,35	6.571	61,51	-
Kota Kendari	72,94	16,03	11,65	13.430	81,30	0,49
Kota Bau-Bau	70,43	14,76	9,48	9.764	73,13	0,79
GORONTALO	67,00	12,49	6,97	8.762	65,17	0,73
Boalemo	67,29	11,89	6,15	7.598	62,18	0,76
Gorontalo	66,53	11,89	6,53	8.032	62,90	1,10
Pokuwato	62,33	11,68	6,54	8.925	61,74	0,60
Bone Bolango	67,50	12,33	7,70	8.669	66,03	0,32
Gorontalo Utara	64,79	11,68	6,59	7.999	61,92	0,52
Kota Gorontalo	71,68	13,76	10,28	11.019	74,97	0,73
SULAWESI BARAT	64,04	11,78	6,88	8.170	62,24	1,14
Majene	60,21	13,11	7,72	9.138	63,74	0,68
Polewali Mamasa	61,14	12,40	6,76	7.220	60,09	1,39
Mamasa	70,28	11,18	6,92	7.022	62,85	0,44
Mamuju	66,37	12,70	6,91	8.494	64,71	0,84
Mamuju Utara	64,83	10,97	7,15	9.989	64,04	0,45
Mamuju Tengah	67,00	11,23	6,49	7.374	61,48	0,70
MALUKU	65,01	13,53	9,15	7.925	66,74	0,98
Maluku Tenggara Barat	62,50	11,81	8,88	5.600	59,81	0,79
Maluku Tenggara	63,98	12,06	8,71	6.804	62,74	1,01
Maluku Tengah	65,59	13,55	8,88	9.547	68,69	1,18
Buru	65,50	12,23	7,15	9.420	65,15	1,30
Kepulauan Aru	61,57	11,03	7,98	6.891	59,91	0,48
Seram Bagian Barat	59,90	12,70	8,42	7.779	62,39	0,96
Seram Bagian Timur	57,70	11,71	6,97	8.492	59,50	1,04
Maluku Barat Daya	60,63	11,30	7,60	6.150	58,09	1,31
Buru Selatan	65,36	11,69	6,62	6.915	60,74	1,43
Kota Ambon	69,46	15,88	11,61	13.146	79,09	1,18
Kota Tual	63,76	13,84	9,65	6.642	64,95	1,23
MALUKU UTARA	67,34	12,72	8,34	7.234	65,18	0,63
Halmahera Barat	65,15	12,15	7,71	6.697	62,06	0,96
Halmahera Tengah	62,20	12,27	7,74	7.130	61,49	0,98
Kepulauan Sula	62,29	11,69	7,91	6.491	60,18	0,67
Halmahera Selatan	64,93	11,32	7,03	6.704	60,34	0,71
Halmahera Utara	68,67	12,29	7,98	6.746	64,18	0,59
Halmahera Timur	67,19	12,06	7,34	7.212	63,26	0,87

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Pulau Morotai	65,78	10,92	6,84	5.720	58,34	0,64
Pulau Taliabu	60,98	10,96	7,40	5.935	57,31	0,80
Kota Ternate	69,97	14,66	11,11	12.454	77,15	0,61
Kota Tidore Kepulauan	68,33	13,09	8,72	7.454	66,76	0,78
PAPUA BARAT	65,14	11,87	6,96	6.944	61,28	0,61
Fak-Fak	67,62	13,25	8,09	6.731	64,73	0,67
Kaimana	63,57	11,19	7,61	7.224	61,07	1,19
Teluk Wondama	58,36	10,26	6,50	7.222	56,27	1,12
Teluk Bintuni	58,42	11,21	7,44	8.929	60,40	1,12
Manokwari	67,60	13,15	7,70	11.069	69,35	0,79
Sorong Selatan	65,34	11,52	6,75	5.520	58,24	0,88
Sorong	65,23	12,38	7,14	6.436	61,23	0,60
Raja Ampat	64,05	11,34	7,32	7.061	60,86	0,82
Tambrauw	58,72	10,73	4,53	4.405	49,40	1,47
Maybrat	64,65	12,11	5,96	4.562	55,36	0,78
Manokwari Selatan	66,67	12,18	6,20	4.149	55,32	0,68
Pegunungan Arfak	66,49	11,05	4,85	4.563	53,69	0,62
Kota Sorong	69,02	13,95	10,86	12.515	75,78	1,08
PAPUA	64,84	9,94	5,76	6.416	56,75	0,89
Merauke	66,49	12,14	8,23	9.882	67,33	0,67
Jayawijaya	57,79	10,64	4,39	6.989	53,37	0,82
Jayapura	66,02	13,54	9,41	9.597	69,55	0,49
Nabire	67,24	10,58	9,45	8.652	66,25	1,23
Yapen Waropen	68,63	11,40	8,68	7.241	64,89	0,84
Biak Namfor	67,85	13,21	9,61	9.553	70,32	1,41
Paniai	65,15	10,30	3,74	6.086	53,93	0,42
Puncak Jaya	63,77	5,93	3,04	4.938	44,32	2,22
Mimika	71,87	10,49	9,30	10.873	70,40	1,30
Boven Digoel	57,64	10,79	7,50	7.646	58,21	0,43
Mappi	63,52	10,41	5,96	5.709	55,74	0,41
Asmat	55,00	7,29	4,34	5.485	45,91	0,82
Yahukimo	64,56	7,47	3,97	4.081	46,36	1,60
Pegunungan Bintang	63,58	4,41	1,97	5.095	39,68	1,88
Tolikara	64,66	7,67	3,04	4.468	46,16	1,07
Sarmi	65,49	10,74	7,89	6.358	60,48	1,63
Keerom	65,99	11,38	6,57	8.514	62,73	0,40
Waropen	65,72	12,12	8,53	5.989	61,97	0,47
Supiori	65,15	12,52	8,11	5.098	59,70	0,50
Membramo Raya	56,37	10,59	4,44	4.303	47,88	1,26
Nduga	53,60	2,16	0,63	3.607	25,38	3,92
Lanny Jaya	64,85	7,11	2,60	3.901	43,28	0,55
Mamberamo Tengah	62,62	7,64	2,40	3.985	43,19	1,79

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Yalimo	64,85	7,68	2,07	4.298	44,21	2,04
Puncak	64,98	4,13	1,43	5.010	38,05	0,84
Dogiyai	64,36	9,41	4,87	5.061	52,25	1,53
Intan Jaya	64,88	6,00	2,32	4.995	43,51	1,92
Deiyai	64,27	9,75	2,95	4.293	48,12	0,79
Kota Jayapura	69,95	14,06	11,09	14.172	77,86	0,51
INDONESIA	70,59	12,39	7,73	9.903	68,90	0,87

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 3. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2010-2014

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
ACEH	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81
SUMATERA UTARA	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87
SUMATERA BARAT	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36
RIAU	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33
JAMBI	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24
SUMATERA SELATAN	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75
BENGKULU	65,35	65,96	66,61	67,50	68,06
LAMPUNG	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42
KEP. BANGKA BELITUNG	66,02	66,59	67,21	67,92	68,27
KEPULAUAN RIAU	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40
DKI JAKARTA	76,31	76,98	77,53	78,08	78,39
JAWA BARAT	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80
JAWA TENGAH	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78
D I YOGYAKARTA	75,37	75,93	76,15	76,44	76,81
JAWA TIMUR	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14
BANTEN	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89
BALI	70,10	70,87	71,62	72,09	72,48
NUSA TENGGARA BARAT	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31
NUSA TENGGARA TIMUR	59,21	60,24	60,81	61,68	62,26
KALIMANTAN BARAT	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89
KALIMANTAN TENGAH	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77
KALIMANTAN SELATAN	65,20	65,89	66,68	67,17	67,63
KALIMANTAN TIMUR	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82
KALIMANTAN UTARA				67,99	68,64
SULAWESI UTARA	67,83	68,31	69,04	69,49	69,96
SULAWESI TENGAH	63,29	64,27	65,00	65,79	66,43
SULAWESI SELATAN	66,00	66,65	67,26	67,92	68,49
SULAWESI TENGGARA	65,99	66,52	67,07	67,55	68,07
GORONTALO	62,65	63,48	64,16	64,70	65,17
SULAWESI BARAT	59,74	60,63	61,01	61,53	62,24
MALUKU	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74
MALUKU UTARA	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18
PAPUA BARAT	59,60	59,90	60,30	60,91	61,28
PAPUA	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75
INDONESIA	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90

Lampiran 4. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2014

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
ACEH	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81
Simeulue	60,60	61,03	61,25	61,68	62,18
Aceh Singkil	62,36	63,13	64,23	64,87	65,27
Aceh Selatan	61,22	61,52	61,69	62,27	62,35
Aceh Tenggara	63,82	64,27	64,99	65,55	65,90
Aceh Timur	61,75	62,35	62,93	63,27	63,57
Aceh Tengah	69,17	70,00	70,18	70,51	70,96
Aceh Barat	66,05	66,47	66,66	66,86	67,31
Aceh Besar	69,76	69,94	70,10	70,61	71,06
Pidie	66,75	66,95	67,30	67,59	67,87
Bireuen	66,42	67,03	67,57	68,23	68,71
Aceh Utara	63,56	64,22	64,82	65,36	65,93
Aceh Barat Daya	60,91	61,75	62,15	62,62	63,08
Gayo Lues	60,93	61,91	62,85	63,22	63,34
Aceh Tamiang	64,67	64,89	65,21	65,56	66,09
Nagan Raya	63,57	64,24	64,91	65,23	65,58
Aceh Jaya	64,75	65,17	66,42	66,92	67,30
Bener Meriah	67,29	68,24	69,14	69,74	70,00
Pidie Jaya	68,38	68,69	68,90	69,26	69,89
Kota Banda Aceh	80,36	80,87	81,30	81,84	82,22
Kota Sabang	69,70	70,15	70,84	71,07	71,50
Kota Langsa	71,79	72,15	72,75	73,40	73,81
Kota Lhokseumawe	71,55	72,35	73,55	74,13	74,44
Kota Subulussalam	58,97	59,34	59,76	60,11	60,39
SUMATERA UTARA	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87
Nias	54,72	55,55	56,50	57,43	57,98
Mandailing Natal	60,76	61,60	62,26	62,91	63,42
Tapanuli Selatan	64,20	65,14	65,95	66,75	67,22
Tapanuli Tengah	64,39	65,16	65,43	65,64	66,16
Tapanuli Utara	68,43	69,24	69,83	70,50	70,70
Toba Samosir	70,90	71,39	71,89	72,36	72,79
Labuhan Batu	66,88	67,88	68,64	69,45	70,06
Asahan	65,06	65,87	66,23	66,58	67,51
Simalungun	68,80	69,03	69,79	70,28	70,89
Dairi	65,91	66,62	66,95	67,15	67,91
Karo	70,36	71,12	71,40	71,62	71,84
Deli Serdang	70,06	70,25	70,88	71,39	71,98
Langkat	64,57	65,77	66,18	67,17	68,00
Nias Selatan	54,54	55,50	55,97	56,78	57,78

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Humbang Hasundutan	63,40	64,06	64,54	64,92	65,59
Pakpak Barat	61,76	63,11	63,88	64,73	65,06
Samosir	65,14	65,81	66,31	66,80	67,80
Serdang Bedagai	64,67	65,28	66,14	67,11	67,78
Batu Bara	63,45	63,95	64,45	65,06	65,50
Padang Lawas Utara	64,25	65,22	65,65	66,13	66,50
Padang Lawas	62,45	63,28	64,05	64,62	65,50
Labuhan Batu Selatan	65,32	65,77	67,06	67,78	68,59
Labuhan Batu Utara	66,72	67,37	67,84	68,28	69,15
Nias Utara		57,53	57,87	58,29	59,18
Nias Barat		55,43	56,20	56,58	57,54
Kota Sibolga	68,37	69,17	69,71	70,45	71,01
Kota Tanjung Balai	63,47	64,13	64,89	65,40	66,05
Kota Pematang Siantar	72,52	73,61	74,51	75,05	75,83
Kota Tebing Tinggi	69,96	70,84	71,34	71,85	72,13
Kota Medan	77,02	77,54	77,78	78,00	78,26
Kota Binjai	70,54	70,85	71,54	72,02	72,55
Kota Padang Sidempuan	70,23	71,08	71,38	71,68	71,88
Kota Gunung Sitoli		63,71	64,34	65,25	65,91
SUMATERA BARAT	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36
Kepulauan Mentawai	55,66	55,90	56,10	56,33	56,73
Pesisir Selatan	65,09	65,80	66,49	67,31	67,75
Solok	64,53	65,28	65,62	66,15	66,44
Sawah Lunto/Sijunjung	62,51	62,92	63,70	64,48	64,95
Tanah Datar	66,47	66,92	67,29	68,12	68,51
Padang Pariaman	65,16	65,89	66,20	67,15	67,56
Agam	66,12	66,94	67,95	68,73	69,32
Limapuluh Koto	64,64	65,20	65,87	66,30	66,78
Pasaman	60,88	61,57	62,26	62,91	63,33
Solok Selatan	64,51	64,81	65,12	65,86	66,29
Dharmas Raya	66,56	67,40	67,76	68,71	69,27
Pasaman Barat	61,77	62,55	63,33	63,92	64,56
Kota Padang	78,44	78,68	79,00	79,23	79,83
Kota Solok	74,38	74,68	75,02	75,54	76,20
Kota Sawah Lunto	67,55	67,97	68,59	69,07	69,61
Kota Padang Panjang	73,27	73,76	74,22	74,54	75,05
Kota Bukit Tinggi	76,12	76,30	76,92	77,67	78,02
Kota Payakumbuh	74,89	75,39	75,89	76,34	76,49
Kota Pariaman	72,56	73,07	73,47	74,51	74,66
RIAU	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33
Kuantan Sengingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47
Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11
Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Pelawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67
Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45
Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72
Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02
Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84
Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22
Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91
Kota Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42
Kota Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86
JAMBI	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24
Kerinci	65,16	65,85	66,71	67,49	67,96
Merangin	63,85	64,40	65,31	65,82	66,21
Sarolangun	64,64	65,20	66,16	67,13	67,67
Batanghari	65,67	66,32	66,97	67,24	67,68
Muara Jambi	62,84	63,39	64,17	65,14	65,71
Tanjung Jabung Timur	57,21	57,77	58,63	59,41	59,88
Tanjung Jabung Barat	61,49	61,98	62,86	63,54	64,04
Tebo	63,62	64,45	65,23	65,91	66,63
Bungo	66,28	66,70	67,20	67,54	67,93
Kota Jambi	72,23	72,96	73,78	74,21	74,86
Kota Sungai Penuh	69,91	70,55	71,23	72,09	72,48
SUMATERA SELATAN	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75
Ogan Komering Ulu	64,13	64,62	65,09	65,51	66,21
Ogan Komering Ilir	61,04	61,68	62,29	63,52	63,87
Muara Enim (Liot)	62,12	62,82	63,34	64,34	65,02
Lahat	62,31	62,93	63,66	64,15	64,52
Musi Rawas	59,69	60,63	61,37	62,23	63,19
Musi Banyuasin	61,79	62,56	63,27	64,18	64,93
Banyuasin	60,31	61,04	61,69	62,42	63,21
Ogan Komering Ulu Selatan	58,88	59,74	60,63	61,58	61,94
Ogan Komering Ulu Timur	63,36	64,27	65,18	66,09	66,74
Ogan Ilir	61,62	62,47	63,03	63,64	64,49
Empat Lawang	61,11	61,86	62,30	62,74	63,17
Penukal Abab Lematang Ilir				59,69	59,89
Musi Rawas Utara				60,56	61,34
Kota Palembang	73,33	74,08	74,74	75,49	76,02
Kota Prabumulih	69,39	70,32	70,95	71,87	72,20
Kota Pagar Alam	61,97	62,71	63,33	64,14	64,75
Kota Lubuk Linggau	70,72	71,62	72,04	72,55	72,84
BENGKULU	65,35	65,96	66,61	67,50	68,06
Bengkulu Selatan	65,84	66,50	66,77	67,61	68,28
Rejang Lebong	64,19	64,92	65,51	66,11	66,55
Bengkulu Utara	63,50	64,61	65,47	66,67	67,27

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kaur	61,39	61,85	62,32	63,17	63,75
Seluma	60,27	61,01	61,55	62,10	62,94
Mukomuko	62,95	63,71	64,16	64,79	65,31
Lebong	61,87	62,43	62,84	63,15	63,90
Kepahiang	62,60	63,44	63,86	64,44	65,22
Bengkulu Tengah	61,70	62,54	63,12	63,71	64,10
Kota Bengkulu	74,92	75,31	75,71	76,16	76,49
LAMPUNG	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42
Lampung Barat	60,93	61,92	62,51	63,21	63,54
Tanggamus	60,09	60,63	61,14	61,89	62,67
Lampung Selatan	61,07	61,95	62,68	63,35	63,75
Lampung Timur	63,23	64,10	65,10	66,07	66,42
Lampung Tengah	64,14	64,71	65,60	66,57	67,07
Lampung Utara	61,82	62,67	62,93	64,00	64,89
Way Kanan	61,27	62,04	62,79	63,92	64,32
Tulang Bawang	63,21	63,67	64,11	64,91	65,83
Pesawaran	58,64	59,44	59,98	60,94	61,70
Pringsewu		64,86	65,37	66,14	66,58
Mesuji		57,32	57,67	58,16	58,71
Tulang Bawang Barat		60,13	60,77	61,46	62,46
Pesisir Barat				58,95	59,76
Kota Bandar Lampung	71,11	72,04	72,88	73,93	74,34
Kota Metro	71,37	72,23	72,86	74,27	74,98
KEP. BANGKA BELITUNG	66,02	66,59	67,21	67,92	68,27
Bangka	66,41	67,37	67,99	69,34	69,79
Belitung	66,79	67,17	67,87	69,27	69,56
Bangka Barat	63,16	64,00	64,92	65,85	66,43
Bangka Tengah	65,10	66,09	66,88	67,67	68,09
Bangka Selatan	59,98	60,53	61,17	62,96	63,54
Belitung Timur	64,99	65,86	66,59	67,71	68,10
Kota Pangkal Pinang	74,68	75,02	75,69	76,14	76,28
KEPULAUAN RIAU	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40
Karimun	66,40	66,82	67,67	68,52	68,72
Bintan	69,87	70,47	71,01	71,31	71,65
Natuna	66,29	67,76	68,80	69,39	70,06
Lingga	57,36	58,51	59,38	60,13	60,75
Kepulauan Anambas	63,03	63,71	64,32	64,86	65,12
Kota Batam	76,98	77,82	78,39	78,65	79,13
Kota Tanjung Pinang	73,76	74,86	75,91	76,70	77,29
DKI JAKARTA	76,31	76,98	77,53	78,08	78,39
Kep. Seribu	64,96	65,79	66,92	67,62	68,48
Kota Jakarta Selatan	80,26	81,22	81,72	82,72	82,94
Kota Jakarta Timur	78,06	78,82	79,52	79,88	80,40

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Jakarta Pusat	77,30	77,97	78,44	78,81	79,03
Kota Jakarta Barat	76,65	77,41	78,05	78,79	79,38
Kota Jakarta Utara	75,15	76,12	76,89	77,16	77,29
JAWA BARAT	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80
Bogor	64,35	64,78	65,66	66,74	67,36
Sukabumi	60,69	61,14	62,27	63,63	64,07
Cianjur	58,58	59,38	60,28	61,68	62,08
Bandung	67,28	67,78	68,13	68,58	69,06
Garut	60,23	60,55	61,04	61,67	62,23
Tasikmalaya	60,21	61,05	61,69	62,40	62,79
Ciamis	64,64	65,48	66,29	67,20	67,64
Kuningan	64,40	65,04	65,60	66,16	66,63
Cirebon	63,64	64,17	64,48	65,06	65,53
Majalengka	62,30	62,67	63,13	63,71	64,07
Sumedang	66,04	66,16	67,36	68,47	68,76
Indramayu	60,86	61,47	62,09	62,98	63,55
Subang	63,54	64,21	64,86	65,48	65,80
Purwakarta	64,93	65,51	66,30	67,09	67,32
Karawang	64,58	65,21	65,97	66,61	67,08
Bekasi	67,58	68,66	69,38	70,09	70,51
Bandung Barat	61,34	62,36	63,17	63,93	64,27
Pangandaran				64,73	65,29
Kota Bogor	71,25	71,72	72,25	72,86	73,10
Kota Sukabumi	67,94	68,67	69,74	70,81	71,19
Kota Bandung	77,49	78,13	78,30	78,55	78,98
Kota Cirebon	70,74	71,49	71,97	72,27	72,93
Kota Bekasi	76,77	77,48	77,71	78,63	78,84
Kota Depok	76,66	76,96	77,28	78,27	78,58
Kota Cimahi	73,76	74,41	74,99	75,85	76,06
Kota Tasikmalaya	66,58	67,18	67,84	68,63	69,04
Kota Banjar	66,81	67,15	67,53	68,01	68,34
JAWA TENGAH	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78
Cilacap	64,18	64,73	65,72	66,80	67,25
Banyumas	66,87	67,45	68,06	68,55	69,25
Purbalingga	63,61	64,33	64,94	65,53	66,23
Banjarnegara	60,70	61,58	62,29	62,84	63,15
Kebumen	63,08	64,05	64,47	64,86	65,67
Purworejo	68,16	69,11	69,40	69,77	70,12
Wonosobo	62,50	63,07	64,18	64,57	65,20
Magelang	63,28	64,16	64,75	65,86	66,35
Boyolali	68,76	69,14	69,51	69,81	70,34
Klaten	70,76	71,16	71,71	72,42	73,19
Sukoharjo	71,53	72,34	72,81	73,22	73,76

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Wonogiri	63,90	64,75	65,75	66,40	66,77
Karanganyar	70,31	71,00	72,26	73,33	73,89
Sragen	67,67	68,12	68,91	69,95	70,52
Grobogan	64,56	65,41	66,39	67,43	67,77
Blora	63,02	63,88	64,70	65,37	65,84
Rembang	64,53	65,36	66,03	66,84	67,40
Pati	65,13	65,71	66,13	66,47	66,99
Kudus	69,22	69,89	70,57	71,58	72,00
Jepara	66,76	67,63	68,45	69,11	69,61
Demak	66,02	66,84	67,55	68,38	68,95
Semarang	69,58	70,35	70,88	71,29	71,65
Temanggung	63,08	64,14	64,91	65,52	65,97
Kendal	66,23	66,96	67,55	67,98	68,46
Batang	61,64	62,59	63,09	63,60	64,07
Pekalongan	63,75	64,72	65,33	66,26	66,98
Pemalang	58,64	59,66	60,78	61,81	62,35
Tegal	61,14	61,97	62,67	63,50	64,10
Brebes	59,49	60,51	60,92	61,87	62,55
Kota Magelang	73,99	74,47	75,00	75,29	75,79
Kota Surakarta	77,45	78,00	78,44	78,89	79,34
Kota Salatiga	78,35	78,76	79,10	79,37	79,98
Kota Semarang	76,96	77,58	78,04	78,68	79,24
Kota Pekalongan	68,95	69,54	69,95	70,82	71,53
Kota Tegal	69,33	70,03	70,68	71,44	72,20
D I YOGYAKARTA	75,37	75,93	76,15	76,44	76,81
Kulon Progo	68,83	69,53	69,74	70,14	70,68
Bantul	75,31	75,79	76,13	76,78	77,11
Gunung Kidul	64,20	64,83	65,69	66,31	67,03
Sleman	79,69	80,04	80,10	80,26	80,73
Kota Yogyakarta	82,72	82,98	83,29	83,61	83,78
JAWA TIMUR	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14
Pacitan	61,14	62,03	62,94	63,38	63,81
Ponorogo	64,13	65,28	66,16	67,03	67,40
Trenggalek	63,67	64,27	65,01	65,76	66,16
Tulungagung	67,28	67,76	68,29	69,30	69,49
Blitar	64,79	65,47	66,17	66,49	66,88
Kediri	66,24	66,84	67,29	68,01	68,44
Malang	63,47	63,97	64,71	65,20	65,59
Lumajang	59,62	60,72	61,31	61,87	62,33
Jember	59,94	60,64	61,31	62,43	62,64
Banyuwangi	64,54	65,48	66,12	66,74	67,31
Bondowoso	59,47	60,46	62,24	63,21	63,43
Situbondo	60,07	60,82	62,23	63,43	63,91

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Probolinggo	59,83	60,30	61,33	62,61	63,04
Pasuruan	60,79	61,43	62,31	63,74	64,35
Sidoarjo	73,75	74,48	75,14	76,39	76,78
Mojokerto	68,14	68,71	69,17	69,84	70,22
Jombang	66,20	66,84	67,82	68,63	69,07
Nganjuk	65,60	66,58	68,07	68,98	69,59
Madiun	64,87	65,98	67,32	68,07	68,60
Magetan	67,58	68,52	69,56	69,86	70,29
Ngawi	64,52	65,84	66,72	67,25	67,78
Bojonegoro	62,19	63,22	64,20	64,85	65,27
Tuban	61,33	62,47	63,36	64,14	64,58
Lamongan	65,40	66,21	67,51	68,90	69,42
Gresik	69,90	71,11	72,12	72,47	72,84
Bangkalan	57,23	58,63	59,65	60,19	60,71
Sampang	54,49	55,17	55,78	56,45	56,98
Pamekasan	59,37	60,42	61,21	62,27	62,66
Sumenep	57,27	58,70	60,08	60,84	61,43
Kota Kediri	72,20	72,93	73,66	74,18	74,62
Kota Blitar	72,56	73,08	73,53	74,53	75,26
Kota Malang	76,69	77,36	78,04	78,44	78,96
Kota Probolinggo	67,30	68,14	68,93	70,05	70,49
Kota Pasuruan	69,69	70,41	72,01	72,89	73,23
Kota Mojokerto	72,78	73,47	74,20	74,91	75,04
Kota Madiun	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81
Kota Surabaya	77,20	77,62	78,05	78,51	78,87
Kota Batu	68,66	69,76	70,62	71,55	71,89
BANTEN	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89
Pandeglang	59,08	59,92	60,48	61,35	62,06
Lebak	58,83	59,82	60,22	61,13	61,64
Tangerang	68,01	68,45	68,83	69,28	69,57
Serang	60,96	61,97	62,97	63,57	63,97
Kota Tangerang	73,69	74,15	74,57	75,04	75,87
Kota Cilegon	68,80	69,26	70,07	70,99	71,57
Kota Serang	68,25	68,69	69,43	69,69	70,26
Kota Tangerang Selatan		76,99	77,68	78,65	79,17
BALI	70,10	70,87	71,62	72,09	72,48
Jembrana	66,70	67,53	67,94	68,39	68,67
Tabanan	70,68	71,35	71,69	72,31	72,68
Badung	75,84	76,66	77,26	77,63	77,98
Gianyar	71,45	72,50	73,36	74,00	74,29
Klungkung	66,01	67,01	67,64	68,08	68,30
Bangli	63,43	63,87	64,53	65,47	65,75
Karangasem	60,58	61,60	62,95	63,70	64,01

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Buleleng	66,98	67,73	68,29	68,83	69,16
Kota Denpasar	79,19	79,77	80,45	81,32	81,65
NUSA TENGGARA BARAT	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31
Lombok Barat	60,61	61,64	62,24	62,91	63,52
Lombok Tengah	58,97	59,77	60,57	61,25	61,88
Lombok Timur	58,86	59,84	60,73	61,43	62,07
Sumbawa	60,93	61,50	61,96	62,44	62,88
Dompu	61,44	61,84	62,60	63,16	63,53
Bima	60,19	60,62	61,05	62,08	62,61
Sumbawa Barat	65,42	65,94	66,45	66,86	67,19
Lombok Utara	56,13	57,13	58,19	59,20	60,17
Kota Mataram	72,47	73,50	74,22	75,22	75,93
Kota Bima	70,11	70,57	71,21	71,72	72,23
NUSA TENGGARA TIMUR	59,21	60,24	60,81	61,68	62,26
Sumba Barat	58,50	59,33	59,98	60,55	60,90
Sumba Timur	59,94	60,43	60,89	61,44	62,04
Kupang	58,57	59,74	60,34	61,07	61,68
Timor Tengah Selatan	55,72	56,82	57,94	58,76	59,41
Timor Tengah Utara	56,93	57,87	59,04	59,56	60,41
Belu	55,78	56,63	57,58	59,12	59,72
Alor	55,46	56,01	56,47	57,52	58,00
Lembata	57,78	58,76	59,51	60,56	61,45
Flores Timur	57,28	58,15	58,93	59,80	60,42
Sikka	59,04	59,62	60,12	60,84	61,36
Ende	61,92	62,78	63,93	64,64	65,25
Ngada	61,84	62,80	63,57	64,43	64,64
Manggarai	57,18	58,02	58,92	59,49	60,08
Rote Nda	54,79	55,78	56,56	57,28	57,82
Manggarai Barat	57,08	57,75	58,13	59,02	59,64
Sumba Barat Daya	56,37	57,35	58,22	59,26	59,90
Sumba Tengah	55,35	56,21	56,66	57,25	57,60
Nageko	60,19	61,05	61,60	62,24	62,71
Manggarai Timur	54,26	54,97	55,28	55,74	56,58
Sabu Raijua		49,16	50,30	51,55	52,51
Malaka				56,14	56,94
Kota Kupang	74,81	75,74	76,38	77,24	77,58
KALIMANTAN BARAT	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89
Sambas	59,81	60,57	61,53	62,47	63,28
Bengkayang	62,50	62,94	63,42	63,99	64,40
Landak	60,36	61,67	62,38	62,72	63,59
Pontianak	59,48	59,95	60,75	62,09	62,78
Sanggau	60,57	60,96	61,39	61,72	62,06
Ketapang	60,63	61,47	62,04	62,85	63,27

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Sintang	59,91	60,80	61,66	62,64	63,19
Kapuas Hulu	59,84	60,83	61,85	62,63	62,90
Sekadau	59,42	59,76	60,14	61,02	61,98
Melawai	60,91	61,18	61,58	62,27	62,89
Kayong Utara	55,83	56,58	57,53	57,92	58,52
Kubu Raya	61,87	62,56	63,42	63,94	64,52
Kota Pontianak	74,87	75,08	75,55	75,98	76,63
Kota Singkawang	67,27	67,50	68,54	69,13	69,84
KALIMANTAN TENGAH	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77
Kotawaringin Barat	68,43	68,53	68,63	69,51	70,14
Kotawaringin Timur	65,24	65,60	66,61	67,95	68,45
Kapuas	63,32	64,01	64,38	64,82	65,29
Barito Selatan	64,51	65,10	65,76	66,20	66,61
Barito Utara	63,87	64,36	64,72	65,12	66,30
Sukamara	62,41	62,86	63,52	63,92	64,44
Lamandau	65,32	65,99	66,49	67,23	67,53
Seruyan	61,60	62,16	62,39	62,81	63,49
Katingan	63,25	64,54	64,87	65,29	65,79
Pulang Pisau	63,76	64,06	64,28	64,76	65,00
Gunung Mas	66,33	66,85	67,30	67,75	68,13
Barito Timur	66,76	67,31	67,97	68,82	69,12
Murung Raya	63,18	64,39	64,85	65,62	66,10
Kota Palangka Raya	76,53	76,98	77,40	78,02	78,50
KALIMANTAN SELATAN	65,20	65,89	66,68	67,17	67,63
Tanah Laut	63,56	64,35	65,16	66,11	66,50
Kota Baru	63,64	64,27	64,87	65,41	65,76
Banjar	64,46	64,75	65,04	65,36	65,71
Barito Kuala	60,24	60,93	61,62	62,12	62,56
Tapin	64,89	65,41	65,92	66,48	66,99
Hulu Sungai Selatan	62,80	63,44	64,03	64,59	65,25
Hulu Sungai Tengah	63,49	63,90	64,34	64,63	65,37
Hulu Sungai Utara	58,50	59,24	60,12	60,77	61,32
Tabalong	65,87	66,60	67,36	68,08	68,36
Tanah Bumbu	64,98	65,59	66,13	66,51	66,94
Balangan	62,88	63,28	63,69	64,03	64,44
Kota Banjarmasin	71,01	72,01	73,45	74,59	74,94
Kota Banjar Baru	75,49	76,23	76,67	77,10	77,30
KALIMANTAN TIMUR	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82
Pasir	66,54	67,11	68,18	69,61	69,87
Kutai Barat	65,90	66,92	67,14	68,13	68,91
Kutai	67,45	68,47	69,12	70,71	71,20
Kutai Timur	66,94	67,73	68,71	69,79	70,39
Berau	69,16	70,43	70,77	72,02	72,26

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Penajam Paser Utara	66,37	66,92	67,17	68,07	68,60
Mahakam Ulu				63,81	64,32
Kota Balikpapan	75,55	76,02	76,56	77,53	77,93
Kota Samarinda	75,85	77,05	77,34	77,84	78,39
Kota Bontang	76,97	77,25	77,55	78,34	78,58
KALIMANTAN UTARA				67,99	68,64
Malinau	66,90	68,15	68,88	69,84	70,00
Bulongan	66,79	67,63	68,16	68,66	69,25
Tana Tidung	61,16	61,92	62,91	63,79	64,70
Nunukan	60,33	60,64	61,18	62,18	63,13
Kota Tarakan	70,95	71,60	72,53	73,58	74,60
SULAWESI UTARA	67,83	68,31	69,04	69,49	69,96
Bolaang Mongondow	62,75	63,16	63,78	64,16	64,53
Minahasa	70,38	70,82	71,43	71,94	72,76
Kep.Sangihe Talaud	64,69	65,34	65,87	66,15	66,82
Kepulauan Talaud	64,37	64,86	65,51	66,14	66,56
Minahasa Selatan	66,11	66,61	67,26	67,68	68,36
Minahasa Utara	68,74	69,62	70,00	70,19	70,54
Bolaang Mongondow Utara	61,34	62,11	62,88	63,67	64,24
Kep. Siau Tagulandang Biaro	61,83	62,45	63,35	63,91	64,35
Minahasa Tenggara	65,66	66,07	67,10	67,34	67,86
Bolaang Mongondow Selatan	59,77	60,47	61,48	62,84	63,57
Bolaang Mongondow Timur	60,04	60,93	61,93	62,64	63,12
Kota Manado	74,47	75,47	76,15	76,56	77,27
Kota Bitung	68,86	69,31	69,89	70,35	70,88
Kota Tomohon	71,27	71,85	72,50	72,99	73,56
Kota Kotamobago	67,89	68,57	69,31	69,86	70,46
SULAWESI TENGAH	63,29	64,27	65,00	65,79	66,43
Banggai Kepulauan	59,42	60,54	61,09	61,74	62,33
Banggai	64,09	64,63	65,44	66,39	67,11
Morowali	65,25	66,03	66,48	66,86	67,91
Poso	64,81	65,59	66,20	66,94	67,65
Donggala	59,73	60,15	61,33	63,38	63,55
Toli-Toli	58,18	59,12	60,05	61,44	61,91
Buol	62,21	63,03	63,98	64,50	65,41
Parigi Moutong	59,17	60,36	61,13	61,98	62,20
Tojo Una-Una	58,33	58,87	59,55	60,32	61,15
Sigi	60,81	61,76	62,88	64,10	64,64
Banggai Laut				61,86	62,12
Morowali Utara				65,01	65,81
Kota Palu	77,39	78,10	78,36	78,65	79,12
SULAWESI SELATAN	66,00	66,65	67,26	67,92	68,49
Selayar	62,15	62,53	62,87	63,16	63,66

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Bulukumba	62,73	63,36	63,82	64,27	65,24
Bantaeng	62,46	63,07	63,99	64,88	65,77
Jeneponto	58,31	58,95	59,62	60,55	61,45
Takalar	60,23	60,83	61,66	62,58	63,53
Gowa	63,83	64,42	64,65	65,45	66,12
Sinjai	61,31	62,13	62,74	63,47	63,83
Maros	64,07	64,95	65,50	66,06	66,65
Pangkajene Kepulauan	62,79	63,60	64,30	65,24	66,16
Barru	64,94	65,73	66,07	67,02	67,94
Bone	59,69	60,21	60,77	61,40	62,09
Soppeng	63,51	63,80	64,05	64,43	64,74
Wajo	63,07	64,00	64,88	65,79	66,49
Sidenreng Rappang	65,54	65,88	66,19	67,15	68,14
Pinrang	66,25	66,96	67,64	68,14	68,92
Enrekang	66,27	67,03	67,74	68,39	69,37
Luwu	63,95	64,71	65,43	66,39	67,34
Tana Toraja	62,83	63,22	63,96	64,55	65,08
Luwu Utara	64,77	65,57	65,99	66,40	66,90
Luwu Timur	68,47	68,94	69,34	69,53	69,75
Toraja Utara	63,51	64,48	64,89	65,65	66,15
Kota Makasar	77,63	77,82	78,47	78,98	79,35
Kota Pare Pare	73,55	74,20	74,67	75,10	75,66
Kota Palopo	73,03	74,02	74,54	75,02	75,65
SULAWESI TENGGARA	65,99	66,52	67,07	67,55	68,07
Buton	59,44	60,12	61,38	61,83	62,31
Muna	62,57	63,08	63,76	64,67	65,09
Konawe/Kab Kendari	66,55	67,16	67,51	68,23	68,68
Kolaka	67,76	68,27	68,86	69,55	70,20
Konawe Selatan	63,20	63,65	64,05	65,02	65,60
Bombana	59,85	60,84	61,82	62,82	63,38
Wakatobi	63,26	64,67	65,24	66,50	66,95
Kolaka Utara	63,17	63,98	64,49	65,35	65,76
Buton Utara	60,94	61,58	62,69	64,20	64,65
Konawe Utara	63,74	64,25	64,87	65,54	66,03
Kolaka Timur				61,78	62,13
Konawe Kepulauan				61,15	61,31
Muna Barat					61,92
Buton Tengah					61,69
Buton Selatan					61,51
Kota Kendari	78,13	79,43	79,97	80,91	81,30
Kota Bau-Bau	70,60	71,11	71,65	72,55	73,13
GORONTALO	62,65	63,48	64,16	64,70	65,17
Boalemo	59,92	60,52	61,11	61,71	62,18

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Gorontalo	60,00	61,04	61,87	62,22	62,90
Pokuwato	59,11	59,85	60,48	61,38	61,74
Bone Bolango	64,00	64,44	65,13	65,82	66,03
Gorontalo Utara	59,26	59,95	60,71	61,60	61,92
Kota Gorontalo	73,07	73,56	74,06	74,43	74,97
SULAWESI BARAT	59,74	60,63	61,01	61,53	62,24
Majene	61,67	62,56	63,06	63,32	63,74
Polewali Mamasa	57,44	58,26	58,62	59,27	60,09
Mamasa	60,88	61,45	61,95	62,57	62,85
Mamuju	61,65	62,28	63,24	64,17	64,71
Mamuju Utara	61,29	62,23	63,00	63,76	64,04
Mamuju Tengah				61,05	61,48
MALUKU	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74
Maluku Tenggara Barat	57,08	57,69	58,56	59,34	59,81
Maluku Tenggara	60,58	60,96	61,75	62,11	62,74
Maluku Tengah	66,12	66,64	67,30	67,89	68,69
Buru	61,60	62,50	63,50	64,31	65,15
Kepulauan Aru	58,22	58,60	59,17	59,62	59,91
Seram Bagian Barat	59,90	60,59	61,47	61,79	62,39
Seram Bagian Timur	57,88	58,07	58,47	58,88	59,50
Maluku Barat Daya	55,75	56,10	56,74	57,34	58,09
Buru Selatan	57,30	57,98	58,91	59,89	60,74
Kota Ambon	76,07	76,70	77,49	78,16	79,09
Kota Tual	61,70	62,69	63,56	64,16	64,95
MALUKU UTARA	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18
Halmahera Barat	59,56	60,33	60,71	61,47	62,06
Halmahera Tengah	58,42	59,34	59,94	60,89	61,49
Kepulauan Sula	57,06	57,98	58,83	59,77	60,18
Halmahera Selatan	58,22	58,86	59,50	59,92	60,34
Halmahera Utara	61,46	62,31	62,94	63,81	64,18
Halmahera Timur	60,06	60,77	61,73	62,71	63,26
Pulau Morotai		56,63	57,16	57,97	58,34
Pulau Taliabu				56,86	57,31
Kota Ternate	74,86	75,52	75,81	76,69	77,15
Kota Tidore Kepulauan	64,48	64,80	65,42	66,25	66,76
PAPUA BARAT	59,60	59,90	60,30	60,91	61,28
Fak-Fak	60,95	61,94	62,56	64,29	64,73
Kaimana	57,25	57,87	58,99	60,36	61,07
Teluk Wondama	52,97	53,74	54,69	55,65	56,27
Teluk Bintuni	56,99	57,87	58,84	59,73	60,40
Manokwari	66,29	67,28	67,86	68,81	69,35
Sorong Selatan	54,24	56,01	56,87	57,73	58,24
Sorong	57,56	58,56	59,18	60,86	61,23

Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Raja Ampat	57,36	58,37	59,06	60,36	60,86
Tambrauw		45,97	47,18	48,69	49,40
Maybrat		53,29	54,13	54,93	55,36
Manokwari Selatan				54,95	55,32
Pegunungan Arfak				53,36	53,69
Kota Sorong	71,96	72,80	73,89	74,96	75,78
PAPUA	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75
Merauke	65,58	66,03	66,28	66,88	67,33
Jayawijaya	50,79	51,66	52,27	52,94	53,37
Jayapura	67,15	68,04	68,85	69,21	69,55
Nabire	64,49	64,96	65,28	65,45	66,25
Yapen Waropen	63,50	63,82	64,11	64,34	64,89
Biak Namfor	68,22	68,80	69,05	69,35	70,32
Paniai	52,57	53,02	53,34	53,70	53,93
Puncak Jaya	38,83	40,36	41,85	43,36	44,32
Mimika	67,96	68,74	68,95	69,50	70,40
Boven Digoel	56,15	56,89	57,45	57,96	58,21
Mappi	54,09	54,61	55,09	55,51	55,74
Asmat	43,69	44,58	45,08	45,54	45,91
Yahukimo	40,63	41,72	43,82	45,63	46,36
Pegunungan Bintang	35,45	36,61	37,82	38,94	39,68
Tolikara	43,44	44,41	44,86	45,68	46,16
Sarmi	56,98	57,96	59,03	59,51	60,48
Keerom	60,00	60,65	61,13	62,49	62,73
Waropen	59,98	60,94	61,32	61,68	61,97
Supiori	57,71	58,31	58,86	59,40	59,70
Membramo Raya	44,89	45,82	46,62	47,28	47,88
Nduga	19,62	21,12	23,07	24,42	25,38
Lanny Jaya	41,49	41,90	42,53	43,05	43,28
Mamberamo Tengah	39,37	40,17	41,39	42,43	43,19
Yalimo	38,47	40,45	41,84	43,33	44,21
Puncak	33,44	35,08	36,85	37,73	38,05
Dogiyai	47,48	48,48	50,59	51,46	52,25
Intan Jaya		40,07	41,89	42,69	43,51
Deiyai		46,12	46,94	47,74	48,12
Kota Jayapura	76,69	76,97	77,25	77,46	77,86
INDONESIA	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90

Lampiran 5. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ASEAN, 1980-2013

Rank	Negara	1980	1990	2000	2005	2008	2010	2011	2012	2013
9	Singapura		0,744	0,800	0,840	0,868	0,894	0,896	0,899	0,901
30	Brunei Darussalam	0,740	0,786	0,822	0,838	0,843	0,844	0,846	0,852	0,852
62	Malaysia	0,577	0,641	0,717	0,747	0,760	0,766	0,768	0,770	0,773
89	Thailand	0,503	0,572	0,649	0,685	0,704	0,715	0,716	0,720	0,722
108	Indonesia	0,471	0,528	0,609	0,640	0,654	0,671	0,678	0,681	0,684
117	Filipina	0,566	0,591	0,619	0,638	0,648	0,651	0,652	0,656	0,660
121	Viet Nam	0,463	0,476	0,563	0,598	0,617	0,629	0,632	0,635	0,638
136	Kamboja	0,251	0,403	0,466	0,536	0,564	0,571	0,575	0,579	0,584
139	Laos	0,340	0,395	0,473	0,511	0,533	0,549	0,560	0,565	0,569
150	Myanmar	0,328	0,347	0,421	0,472	0,500	0,514	0,517	0,520	0,524

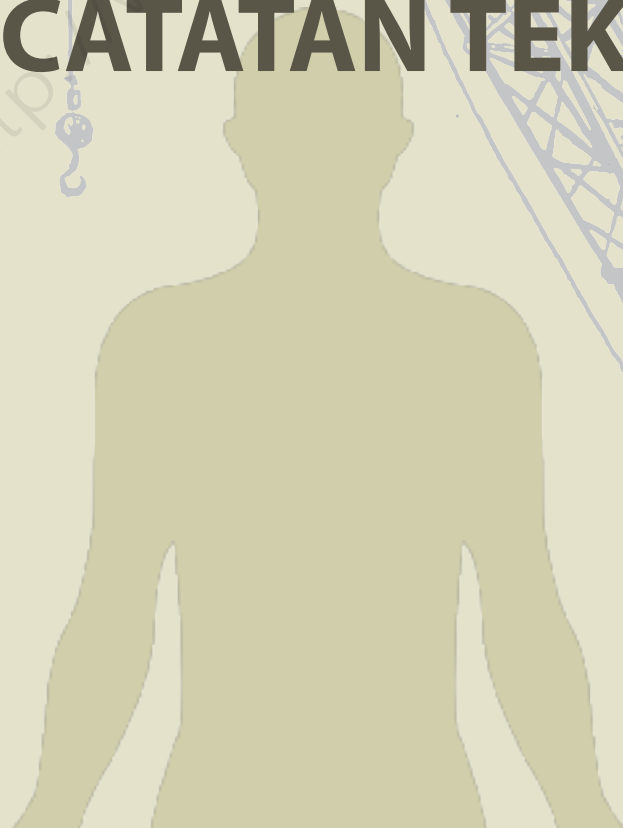
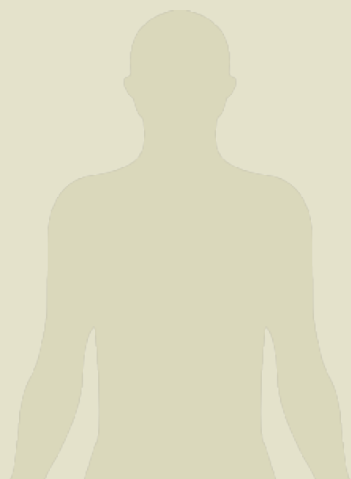
Sumber: Human Development Report 2014

<http://www.bps.go.id>



CATATAN TEKNIS

<http://www.bps.go.id>



Catatan Teknis

Konsep Pembangunan Manusia

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia – yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu

diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi – sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan Hidup saat Lahir

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \quad (1)$$

Keterangan:

- PPP_j : paritas daya beli di wilayah j
- p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j
- p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
- m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel L1. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel L1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan

Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \quad (4)$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

Tabel L2. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (7)$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok "sangat tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "tinggi": $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok "sedang": $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok "rendah": $IPM < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 384195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Email : bpsHQ@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>

